

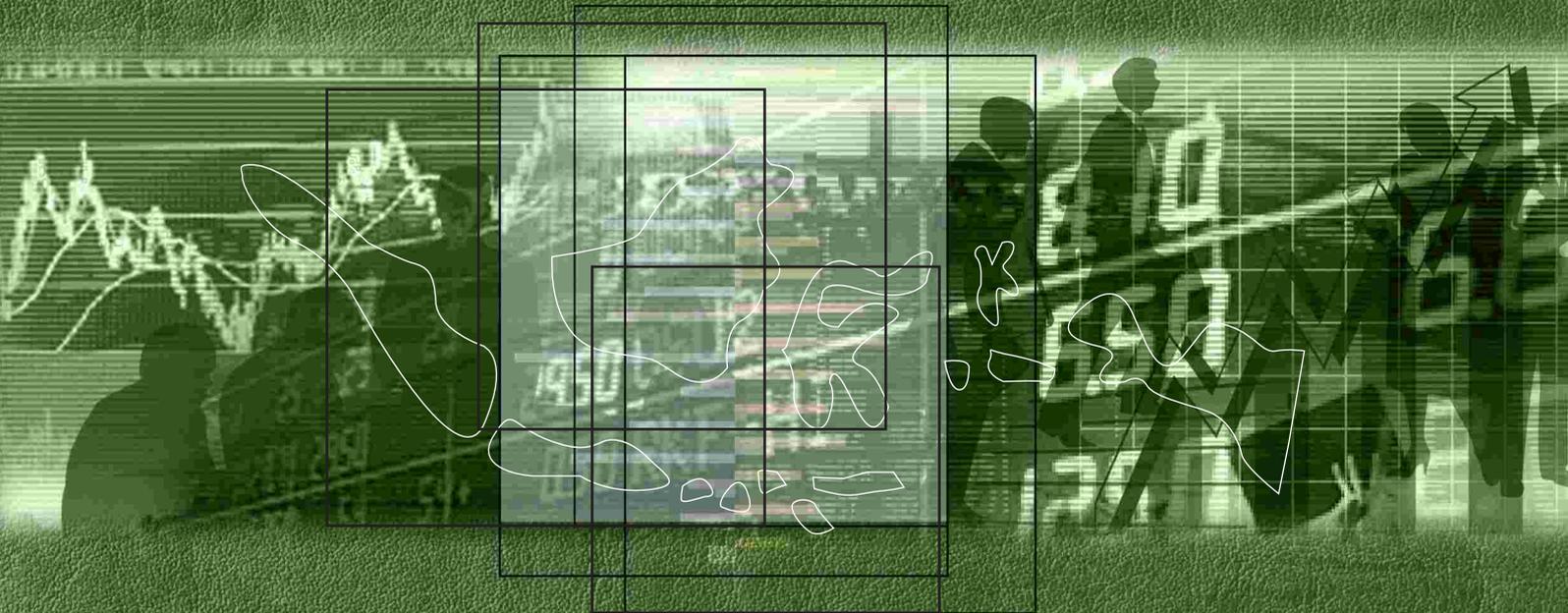
DASAWARSA 2006
PEKERJAAN LAYAK 2006
ASIA-PASIFIK 2015



International
Labour
Organization

Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2012

Upaya untuk menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan



DECENT WORK

A better world start here

Kantor ILO untuk Indonesia

Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2012

Upaya untuk menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan

Publikasi-publikasi Kantor Perburuhan Internasional memperoleh hak cipta yang dilindungi oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), Kantor Perburuhan Internasional, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, melalui email: pubdroit@ilo.org. Kantor Perburuhan Internasional menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar di Inggris Raya dengan Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP [Fax: (+44) (0)20 7631 5500; email: cla@cla.co.uk], di Amerika Serikat dengan Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1) (978) 750 4470; email: info@copyright.com] atau di negara-negara lain dengan Reproduction Rights Organizations terkait, dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini.

ISBN 978-92-2-027436-1 (print)
978-92-2-827437-0 (web pdf)

ILO

Tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia 2012: Upaya untuk menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan/ Kantor Perburuhan Internasional – Jakarta: ILO, 2013

x, 56 p.

Juga tersedia dalam Bahasa Inggris: *Labour and social trends in Indonesia 2012: Working for a sustainable and equitable economy*; ISBN: 978-92-2-027436-1 (print); 978-92-2-127437-7 (web pdf)/ International Labour Office – Jakarta: ILO, 2013

x, 56 p

ILO Katalog dalam terbitan

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi Kantor Perburuhan Internasional mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas negara tersebut.

Tanggung jawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggung jawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional atas opini-opini yang terdapat di dalamnya.

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor lokal ILO di berbagai negara, atau secara langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland; atau Kantor ILO Jakarta, Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia. Katalog atau daftar publikasi tersedia secara cuma-cuma dari alamat di atas, atau melalui email: pubvente@ilo.org

Kunjungi halaman web kami: www.ilo.org/publns

Kata Pengantar

Edisi kelima dari *Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia* menganalisis kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Edisi ini dikeluarkan oleh Kantor Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Jakarta. Organisasi Perburuhan Internasional merupakan organisasi yang terdiri dari 185 pemerintahan, organisasi pekerja dan pengusaha di seluruh dunia yang berdedikasi untuk menciptakan pekerjaan layak. Pada tahun 2012, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonominya, dengan tingkat pengangguran yang terus menurun dan formalisasi pekerjaan yang semakin meningkat. Tren ini membuka jalan bagi Indonesia yang lebih sejahtera di masa mendatang. Laporan tahun lalu melihat adanya upaya untuk mempromosikan pertumbuhan yang kaya pekerjaan dari perspektif provinsi didasari oleh kepedulian pada keadilan regional antar provinsi di Indonesia, terutama mengingat distribusi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja masih tidak merata secara spasial.

Tahun ini kami mengalihkan perhatian pada upaya untuk mempromosikan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Indonesia dengan cepat menjadi pemimpin dunia dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia tidak hanya berkomitmen untuk menciptakan pertumbuhan pekerjaan yang tinggi, namun juga menetapkan target yang ambisius untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan secara lingkungan, ekonomi maupun sosial. Indonesia terkenal akan sumber daya alamnya, yang mencakup obyek wisata seperti terumbu karang, pantai berpasir putih, gunung berapi, hutan hujan tropis dan lahan gambut, serta sumber daya mineral dan cadangan minyak yang berlimpah. Pengelolaan kekayaan alam Indonesia secara berkelanjutan menjadi hal terpenting bagi kesejahteraan generasi mendatang dan tantangan jangka pendek bagi pembuat kebijakan saat ini.

Meskipun tidak ada model kebijakan ‘satu solusi untuk semua masalah’ atau ‘solusi langsung’ sebagai solusi optimal untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan secara sosial, lingkungan dan ekonomi, namun dapat dikatakan bahwa cara tercepat untuk memperbaiki lingkungan adalah melalui kualitas pekerjaan. Kegiatan ekonomi menyediakan mata pencaharian bagi masyarakat dan mempengaruhi lingkungan dan iklim – dan demikian pula sebaliknya. Isu utama di sini adalah memastikan bahwa ketenagakerjaan dapat dipertahankan untuk jangka pendek, menengah maupun panjang – yang terkait erat dengan pemanfaatan lingkungan dan kelayakan pekerjaan. Pekerjaan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai target lingkungan yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Kami berharap konsep ILO mengenai “pekerjaan hijau” (ramah lingkungan) atau “*green jobs*” dapat digunakan untuk mengurangi dampak ketenagakerjaan terhadap lingkungan hidup dan dapat diterapkan untuk mendukung pencapaian target emisi gas rumah kaca.

Laporan ini disusun oleh Emma Allen, ekonom pasar tenaga kerja Kantor ILO di Jakarta, dengan dukungan dari para kolega dan tenaga ahli di Indonesia maupun di seluruh kawasan ini. Laporan ini menerima masukan penting dari kolega kami di Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, serta Unit Analisis Ekonomi dan Sosial Regional dari Kantor Regional ILO untuk kawasan Asia-Pasifik.

Besar harapan kami bahwa laporan ini dapat digunakan sebagai bahan diskusi yang bermanfaat dan membantu Indonesia dalam membangun ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Kami mengharapkan adanya kerjasama dengan para konstituen kami di Indonesia melalui penyediaan bantuan keahlian teknis maupun proyek-proyek kerjasama teknis untuk membantu penciptaan jalur pertumbuhan ekonomi padat karya dan berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat bagi penduduk di masa sekarang maupun di masa mendatang

Peter van Rooij

Direktur

Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste

Daftar singkatan dan istilah

ACILS	The American Center for International Labour Solidarity
APINDO	Asosiasi Pengusaha Indonesia
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BNP2TKI	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPS	Badan Pusat Statistik
CO2	Karbon dioksida
EMRP	Ex Mega Rice Project
FDI	Foreign Direct Investment (Investasi Asing Langsung)
G20	Group of Twenty
GHG	Green House Gas (Gas rumah kaca)
IDR	Rupiah Indonesia
ILO	International Labour Organization
Kemenakertrans	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
KILM	Key Indicators of the Labour Market (Indikator Penting Pasar Tenaga Kerja)
Komnas Perempuan	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
LULUCF	Land Use, Land Use Change and Forestry (Pemanfaatan Lahan, Alih Fungsi Lahan dan Kehutanan)
MAMPU	Access to Employment and Decent Work
MP3EI	Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
MDG	Millennium Development Goal (Tujuan Pembangunan Milenium)
NTB	Nusa Tenggara Barat
NTT	Nusa Tenggara Timur
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
PDB	Produk domestik bruto
PDBD	Produk domestik bruto daerah
PKH	Program Keluarga Harapan
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SFM	Sustainable Forestry Management
SIYB	Start and Improve Your Business (Memulai dan Meningkatkan Usaha Anda)
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
USD	Dolar Amerika Serikat
UNPDF	United Nation Partnership Development Framework
UNEP	United Nation Environment Programme

Catatan: Ejaan bahasa Inggris untuk Pulau Jawa menggunakan huruf ‘v’, sementara ejaan dalam bahasa Indonesia dengan huruf ‘w’, Jawa. Jika laporan mengacu pada nama provinsi di Jawa, maka penulisannya mengikuti ejaan dalam bahasa Indonesia (misal: Jawa Timur)

Daftar Isi

Kata pengantar	iii
Daftar singkatan dan istilah	iv
Daftar tabel	vi
Daftar gambar	vi
Daftar kotak	vi
Ringkasan eksekutif	vii
Bab 1 Tren ekonomi dan pasar tenaga kerja	1
1.1 Tren ekonomi	1
1.2 Tren pasar tenaga kerja	7
Bab 2 Upaya untuk menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan	21
2.1 Pentingnya kualitas tenaga kerja untuk pembangunan yang berkelanjutan	21
2.2 Perlindungan sosial demi kelangsungan ekonomi	24
2.3 Memperkirakan biaya untuk memperluas perlindungan sosial di Indonesia	27
2.4 Dampak ekonomi dari program pekerjaan umum dan transfer tunai di Indonesia	30
2.5 Revitalisasi Program Padat Karya	34
2.6 Pekerjaan hijau untuk ekonomi hijau	38
2.7 Pariwisata yang berkelanjutan	44
2.8 Ketahanan sosial: kesetaraan upah	46
2.9 Bekerja menuju perekonomian yang adil dan berkelanjutan	48
Lampiran I: Pemilahan tenaga kerja di sektor ekonomi formal dan informal, BPS	50
Lampiran II: Tambahan statistik – Indikator pasar tenaga kerja berdasarkan gender 2006-2012	51
Lampiran III: Tambahan statistik – Indikator pasar tenaga kerja untuk kaum muda 2006-2012	54
Lampiran IV: Tambahan statistik – Indikator upah 2006-2012	55
Lampiran V: Tambahan statistik – Indikator pasar tenaga kerja berdasarkan sektor ekonomi 2006-2012	56

Daftar Tabel

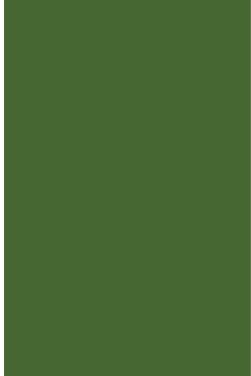
Tabel 1:	Prestasi pendidikan dari penduduk yang aktif secara ekonomi dalam persen, 2010-2012	10
Tabel 2:	Presentase pekerja dalam pekerjaan rentan tahun 2012	13
Tabel 3:	Ketenagakerjaan berdasarkan sektor 2008-2012 dalam persen	16
Tabel 4:	Upah minimum rata-rata dan upah nominal rata-rata untuk Indonesia, 2010-2012	18
Tabel 5:	Upah rata-rata pekerja berdasarkan gender dan lokasi, 2012	19
Tabel 6:	Elastisitas output pekerjaan berdasarkan sektor	21
Tabel 7:	Pemetaan skenario untuk simulasi transfer tunai	31
Tabel 8:	Pemetaan skenario untuk simulasi pekerjaan umum	32
Tabel 9:	Estimasi pekerjaan hijau di Indonesia, 2008	40

Daftar gambar

Gambar 1	: Pertumbuhan PDB Indonesia dan dunia, 1962-2011	1
Gambar 2	: Komposisi sektoral PDB tahun 2006 dan 2011 dalam persen	3
Gambar 3	: Formasi modal tetap Indonesia dan dunia, 2002-2011	4
Gambar 4	: Inflasi harga konsumen Indonesia dan dunia, 2006-2010	5
Gambar 5	: Emisi karbon dari pembakaran bahan bakar di Indonesia dan dunia, 2010	6
Gambar 6	: Partisipasi tenaga kerja dan pengangguran dalam persen, 2007-2012	7
Gambar 7	: Tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan, 2010-2012	9
Gambar 8	: Pekerjaan formal dan informal antara 2001 dan 2012, dalam persen	14
Gambar 9	: Formalitas berdasarkan provinsi dalam persen, Agustus 2012	15
Gambar 10	: Upah minimum rata-rata untuk pekerja dan buruh, 2007-2012	17
Gambar 11	: Tren upah minimum dan rata-rata untuk Indonesia, 2001-2012	19
Gambar 12	: Kerangka kerja untuk mengidentifikasi pekerjaan hijau	38

Daftar kotak

Kotak 1	: “Rencana Aksi Ketenagakerjaan” dari Wakil Presiden	24
Kotak 2	: Rekomendasi landasan perlindungan sosial, 2012 (No. 202)	26
Kotak 3	: Penyediaan layanan kesehatan bagi pekerja: Variasi dalam produktivitas dan efisiensi di tingkat perusahaan: Sebuah studi kasus tentang industri pakaian di Jakarta	29
Kotak 4	: Pangkalan data terpadu untuk mempercepat pengurangan kemiskinan	37
Kotak 5	: Akses mata pencaharian hijau dan REDD+	43



Ringkasan eksekutif

Indonesia tengah berupaya untuk mencapai target pengurangan kemiskinan jangka menengah (antara delapan dan sepuluh persen) dan target pengurangan pengangguran (antara lima dan enam persen) pada tahun 2014. Target pengurangan kemiskinan dan pengangguran biasanya digunakan sebagai indikator dalam mengukur pembangunan sosial-ekonomi secara global. Namun target-target ini hanya menyediakan gambaran yang terbatas tentang kualitas pertumbuhan dan pembangunan dan kita perlu memiliki pemahaman yang lebih rinci mengenai kualitas pekerjaan dan pengembangan mata pencaharian, khususnya bagi mereka yang telah berhasil keluar dari deprivasi, untuk memastikan kebijakan tersebut efektif dalam meningkatkan pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, laporan ini memberikan analisis tentang indikator-indikator pilihan yang memberi gambaran lebih jauh tentang kualitas pekerjaan dan pembangunan makro-ekonomi di Indonesia. Perhatian khusus diberikan pada analisis tren dan strategi yang menggambarkan bagaimana Indonesia berupaya menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Bagian awal laporan ini menyorot pentingnya tren sosial-ekonomi dan kinerja pasar tenaga kerja, yang difokuskan pada gender, kaum muda dan tingkat kepentingannya. Sedangkan bagian akhir dari laporan ini menyediakan analisis tentang pekerjaan secara lebih rinci serta strategis untuk membawa Indonesia lebih dekat kepada pekerjaan layak untuk semua dengan melihat keberlangsungan ekonomi, sosial dan lingkungan di dunia kerja.

Prospek keseluruhan Indonesia untuk tahun 2012 sangat positif. Ekonomi terus berkembang, dengan tingkat pertumbuhan PDB sebesar 6,23 persen, terlepas dari ketidakpastian krisis global. Ketangguhan ekonomi Indonesia pada beberapa tahun terakhir terkait erat dengan fokus kuat negara ini terhadap pembangunan infrastruktur ekonomi guna mengatasi hambatan pembangunan, dan dalam memperkuat hubungan dengan pasar domestik dan internasional guna mempercepat investasi.

Sebuah pencapaian besar telah dicapai dalam upaya negara ini untuk meningkatkan tren menuju formalitas. Tren selama tiga tahun terakhir

memperlihatkan adanya pergeseran substansial menuju formalitas dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2012 diperkirakan 53,6 persen pekerja bekerja di sektor perekonomian informal dan angka ini merupakan angka informalitas terendah yang pernah ada. Pertumbuhan pekerjaan terus melebihi tingkat pertumbuhan tenaga kerja, di mana tingkat pertumbuhan pekerjaan sekitar 1,0 persen dengan 1.137.755 pekerjaan baru di negara ini antara bulan Agustus 2011 dan Agustus 2012. Kaum muda juga menunda partisipasi mereka dalam pasar tenaga kerja agar dapat mengenyam pendidikan SMA atau SMK, dan ini penting untuk memperkuat produktivitas tenaga kerja dan kualitas pekerjaan bagi masa depan yang lebih baik di Indonesia.

Pada tahun 2012 tingkat pengangguran turun hingga mencapai 6,14 persen pada bulan Agustus. Tren pengangguran menurun tajam di kalangan mereka yang memiliki diploma dan sarjana, sehingga meningkatkan permintaan akan pekerja terampil dan terdidik mengingat semakin moderennya perekonomian Indonesia. Meskipun sudah ada kecenderungan menurun, namun tingkat pengangguran secara keseluruhan dan pengangguran di kalangan muda masih tetap tinggi. Pengangguran di kalangan muda diperkirakan mencapai angka 19,56 persen pada Agustus 2012, menurun dari 19,99 persen pada Agustus 2011. Namun, kemungkinan pemuda menjadi pengangguran masih 5,97 kali lebih besar dibandingkan mereka yang berusia 25 tahun ke atas dan jumlahnya lebih dari 55 persen dari penduduk pengangguran.

Pada tahun 2012 upah minimum regional untuk Indonesia kira-kira Rp. 1.121.460, meningkat 11,8 persen dari tahun sebelumnya. Nominal upah rata-rata telah meningkat secara konstan sejak beberapa tahun terakhir. Pada Agustus 2012 nominal upah rata-rata bulanan untuk pekerja dan buruh kira-kira Rp. 1.630.193. Di akhir tahun 2012, peningkatan signifikan pada upah minimum terjadi di tingkat provinsi. Peningkatan tertinggi terjadi di Jakarta, di mana upah minimum akan meningkat 44 persen atau dari Rp. 1,5 juta menjadi Rp. 2,2 juta pada tahun 2013. Peningkatan pada upah ini menyebabkan perusahaan mengkaji kembali kemampuan usaha perusahaan, terutama pada produksi padat karya. Akibatnya, perusahaan menunda lamaran kerja untuk menghindari upah minimum dan mempertimbangkan pilihan pemindahan lokasi. Pada tahun 2013 akan terlihat kemerosotan dalam situasi ketenagakerjaan secara umum di Indonesia sejalan dengan pelaksanaan penyesuaian upah.

Peningkatan upah umum di Indonesia selalu beriringan dengan indeks harga konsumen pada tahun-tahun terakhir, namun perkembangan dalam penghasilan layak dan produktivitas tidak terlalu baik. Perbedaan upah berdasarkan gender tetap ada, di mana laki-laki menerima upah sekitar 26 persen lebih tinggi dibandingkan perempuan. Seiring waktu perbedaan antara upah rata-rata minimum dan upah menengah mengecil; upah rata-rata menengah 70,8 persen lebih tinggi dibandingkan upah minimum pada tahun 2001 tetapi hanya 45,4 persen lebih tinggi pada tahun 2012. Hal

ini menunjukkan bahwa meski upah minimum dan upah menengah telah berkembang secara konstan, posisi keseluruhan pekerja mungkin menurun. Di sisi lain, pekerja paruh waktu telah berkembang di Indonesia dan telah memainkan peran penting dalam memperluas kesempatan kerja dan dalam mengurangi pengangguran. Pengangguran terselubung juga menurun. Di sisi lain, jumlah pekerja dengan jam kerja lebih tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan 55,96 persen pekerja yang bekerja lebih dari 40 jam seminggu. Ini menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat pengawasan dari kebijakan upah minimum dan juga kebutuhan untuk menunjang hubungan industri dan dialog sosial antara pekerja dengan pengusaha.

Pekerja rentan, di mana mengacu kepada pekerja yang terdiri dari pekerja mandiri, pekerja musiman dan pekerja keluarga, tetap tinggi di Indonesia. Antara 60 hingga 63 persen dari keseluruhan jumlah pekerja dapat dikategorikan sebagai “pekerja rentan”. Analisis dari pekerja rentan berdasarkan gender menunjukkan bahwa terdapat perbedaan besar pada pekerja rentan terhadap jenis kelamin, dan bahwa kebiasaan dan komposisi dari pekerja rentan juga sangat berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan tiga kali lebih besar dibandingkan laki-laki untuk digolongkan sebagai pekerja rentan akibat statusnya sebagai pekerja keluarga, sementara laki-laki akan digolongkan sebagai pekerja rentan ketika mereka menjadi pekerja mandiri atau pekerja musiman. Sebagaimana sulitnya transisi dari pekerja keluarga ke pekerjaan di luar unit keluarga, dimensi gender dari pekerja rentan di Indonesia membutuhkan perhatian khusus dari pembuat kebijakan.

Pada konteks ini akses terhadap perlindungan sosial sangatlah penting, namun kajian menemukan perlindungan sosial di Indonesia masih terbatas dalam hal cakupan dan layanan. Keterkaitan antara program perlindungan sosial dengan layanan pekerja juga terbatas. Guna menjamin perlindungan sosial untuk semua pada tingkat minimum atau untuk “menghapus kesenjangan landasan perlindungan sosial”, diperkirakan pengeluaran untuk perlindungan sosial dua kali lebih besar. Namun, sejauh mana berbagai bentuk program perlindungan sosial merangsang perekonomian dan menciptakan lapangan kerja bagi kelompok sasaran tidaklah jelas. Sebagai contoh, program pekerjaan umum dan bantuan tunai langsung mampu merangsang perekonomian dan mengurangi kemiskinan, tetapi keefektifan dan dampak secara keseluruhan dari perangkat-perangkat ini membutuhkan pemahaman yang lebih baik demi hasil yang optimal. Program pekerjaan umum cenderung lebih baik dalam menstimulasi pertumbuhan dan menciptakan pekerjaan, sementara transfer tunai cenderung memiliki hasil lebih baik ketika disasarkan pada rumah tangga miskin. Menemukan kombinasi terbaik dari kedua jenis program bisa membantu Indonesia mengoptimalkan hasil pembangunan dan peningkatan pertumbuhan berkelanjutan.

Selanjutnya, guna mengupayakan pertumbuhan ekonomi padat karya, Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan ramah

lingkungan. Rencana Nasional Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 26 persen (atau 41 persen dengan bantuan internasional) pada tahun 2020 telah didukung melalui pelaksanaan proyek percontohan di Kalimantan Tengah – provinsi percontohan REDD+. Kegiatan ini bertujuan untuk menangani isu terkait dengan konservasi hutan dan alih fungsi lahan yang menjadi sumber utama dari emisi karbon di Indonesia melalui peningkatan akses terhadap mata pencaharian berkelanjutan.

Kebutuhan akan mata pencaharian layak dan pekerjaan yang berkualitas merupakan tema sentral bagi konsep keberlanjutan lingkungan hidup, mengingat hubungan antara emisi karbon dan kegiatan ekonomi. ILO telah bekerja sama secara erat dengan para konstituen untuk mempromosikan konsep “pekerjaan hijau” (*green jobs*) dan memperkirakan bahwa sekitar 3,9 juta pekerjaan atau 3,8 persen dari seluruh jenis pekerjaan dapat dikategorikan sebagai “pekerjaan hijau” (ramah lingkungan dan sosial). *Green jobs* telah menyediakan sebuah kerangka kerja strategis untuk mempromosikan pertumbuhan yang berkeadilan di Indonesia. Ini telah mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk meluncurkan Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan *Green Jobs* di Indonesia yang pada tahun 2012, yang menyediakan kerangka kerja terpadu guna mempromosikan industri pariwisata padat karya yang berkelanjutan. Diharapkan kementerian lainnya akan mengambil tindakan serupa di masa mendatang.

Kendati pada tahun 2012 Indonesia berjalan pada jalurnya untuk mencapai target angka pengangguran tahun 2014, masih banyak tantangan dalam mewujudkan tujuan “pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan”. Sebagian besar pekerja masih jauh dari memiliki pekerjaan layak yang menyediakan perlindungan sosial yang memadai, memenuhi standar ketenagakerjaan minimum dan menikmati manfaat dialog sosial. Untuk itu, Indonesia tidak bisa hanya berkonsentrasi dalam mengurangi pengangguran untuk mendukung pembangunan sosial-lingkungan-ekonomi yang adil. Perhatian lebih jauh harus diberikan untuk kualitas dan keberlanjutan mata pencaharian dan pekerjaan, terutama bagi mereka yang mampu membebaskan diri dari tingkat kekurangan terparah. Indonesia telah menetapkan target untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan mengurangi emisi karbon. Tantangannya adalah memastikan bahwa kerangka kebijakan yang ada menyediakan kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk mewujudkan pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan.

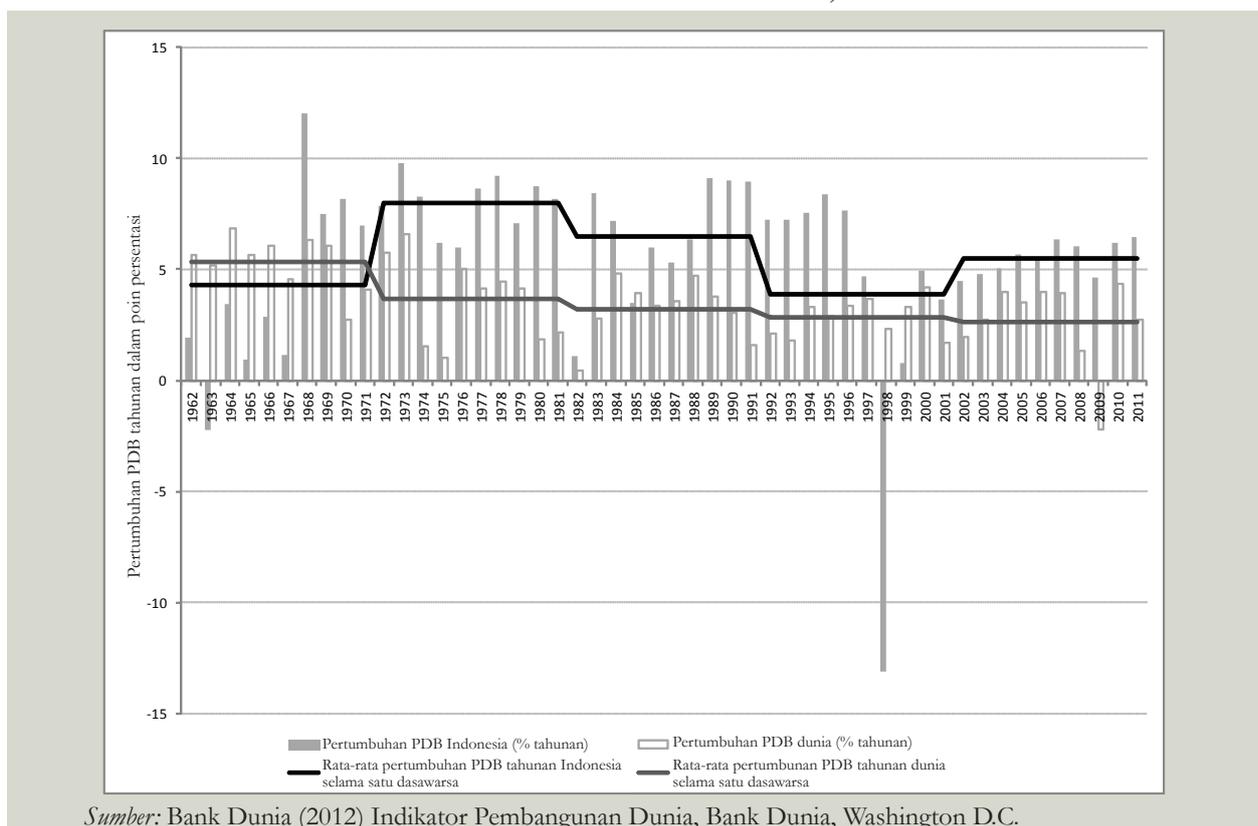
Tren ekonomi dan pasar tenaga kerja

1.1. Tren ekonomi

Perekonomian Indonesia terus berkembang dan termasuk dalam salah satu perekonomian di dunia yang tetap tumbuh di balik ketidakpastian yang melanda ekonomi global. Rata-rata pertumbuhan PDB tahunan lebih tinggi dari perkiraan rata-rata PDB global dan terus tumbuh dengan tren meningkat. Seperti yang digambarkan pada Gambar 1, pertumbuhan PDB Indonesia pulih dengan stabil setelah Krisis Finansial Asia pada 1998 dan sering kali mencapai tingkat pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan global belakangan ini. Pada tahun 2012 tren terus berlanjut, dengan pertumbuhan PDB tahun 2012 di kisaran 6,23 persen, sedikit lebih rendah dari target pertumbuhan PDB pemerintah yaitu 6,3 persen.

Ekonomi Indonesia terus berkembang pada tahun 2012

Gambar 1:
Pertumbuhan PDB Indonesia dan dunia, 1962-2011



Sumber: Bank Dunia (2012) Indikator Pembangunan Dunia, Bank Dunia, Washington D.C.

Perlu dicatat bahwa pertumbuhan di sektor non-migas melaju cepat (6,8 persen), sementara sektor migas menurun (-3,3 persen). Prestasi kekuatan ekonomi Indonesia saat ini disebabkan dari besarnya konsumsi domestik, begitu juga permintaan untuk sumber daya utama dan pertumbuhan investasi yang besar di sektor non-migas.

*Ekspor bersih
meningkat dengan
stabil*

Menghadapi ketidakstabilan global, ekonomi Indonesia terus terpapar dengan risiko yang berhubungan dengan penurunan permintaan untuk ekspor dan turunnya investasi asing. Namun, kondisi masih tetap menguntungkan, dengan nilai ekspor net (sebagai contoh ekspor impor dikurangi) meningkat dan terhitung 11,3 persen dari PDB pada 2011, naik 9,4 persen pada 2007. Akan menjadi penting untuk terus fokus pada pembangunan infrastruktur ekonomi, keterkaitan antara pasar domestik dan internasional serta stabilitas makro-ekonomi untuk menyediakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

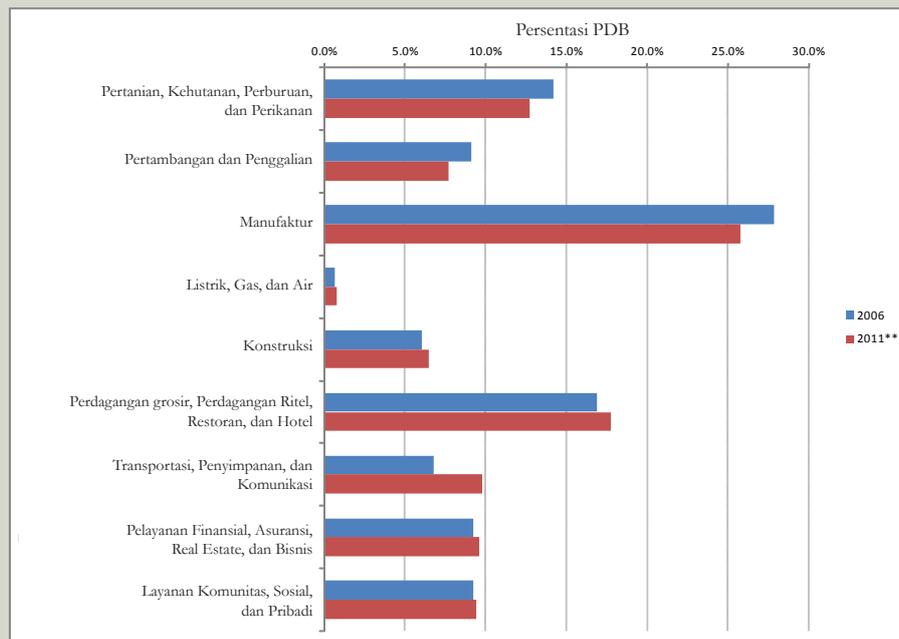
*Tetapi, volatilitas
dalam harga
komoditas terus
memengaruhi hasil*

Harga komoditi terus mengalami naik turun pada tahun 2012 dan hal ini memberikan tekanan pada sejumlah komoditi kunci yang terpadu dengan strategi pembangunan jangka panjang Indonesia. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) telah mengidentifikasi 22 kegiatan ekonomi utama untuk mendorong kemakmuran negara, termasuk minyak sawit, tembaga, besi dan baja, bauksit, batu bara, minyak dan gas. Pada tahun 2012 harga minyak sawit dan batu bara turun dengan perkiraan 20 persen dibandingkan dengan harga pada tahun 2011.

*Pergeseran sektoral
terus berkembang*

Baru-baru ini Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mendukung transformasi struktur secara sektoral. Tren menunjukkan bahwa perekonomian berpindah dari sektor primer menuju sektor tersier. Tahun 2006 sektor primer menyumbang 23,3 persen dari PDB, sektor sekunder 34,6 persen, sementara sektor tersier 42,1 persen. Tahun 2011, sektor primer memberikan sumbangan 20,4 persen dari PDB, sektor sekunder 33,0 persen dan sektor tersier 46,6 persen. Selain itu, kebijakan-kebijakan mendukung percepatan investasi, yang tercermin pada meningkatnya proporsi PDB dari sektor konstruksi.

Gambar 2:
Komposisi sektoral PDB tahun 2006 dan 2011 dalam persen

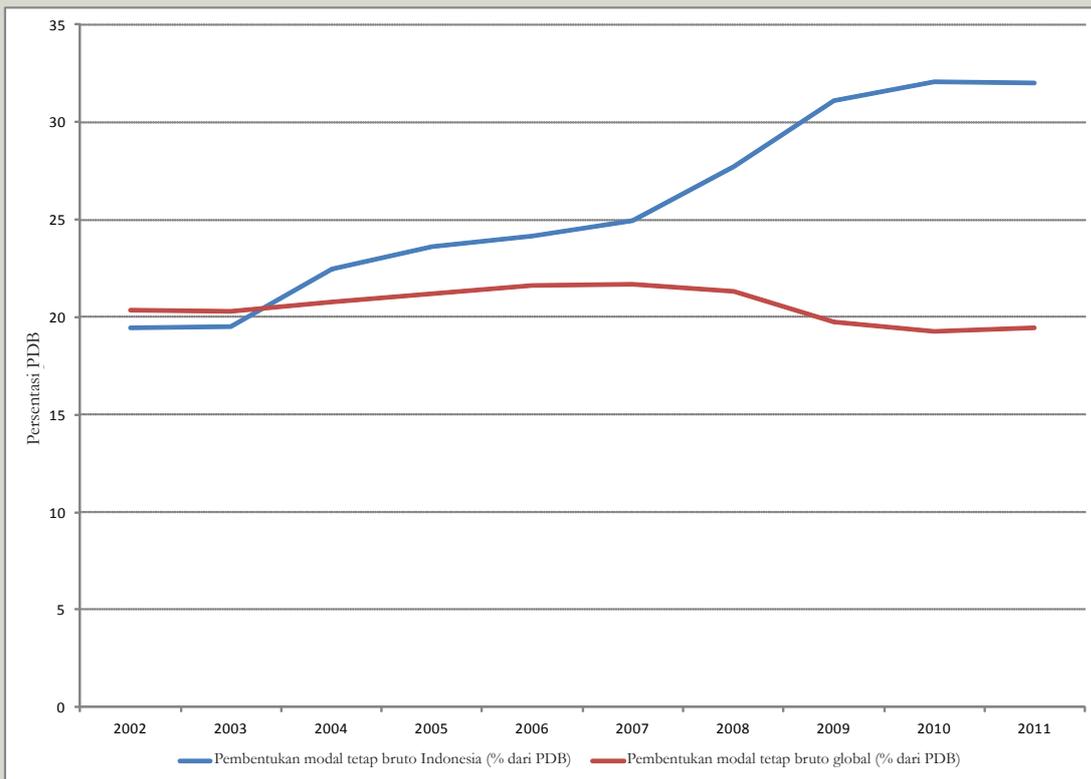


Sumber: BPS (2012) *Produk Domestik Bruto*, Badan Pusat Statistik, Jakarta

Kelayakan dan kualitas infrastruktur telah menjadi kendala kritis untuk percepatan pertumbuhan di Indonesia. Namun, tren belakangan ini menunjukkan bahwa pembentukan modal tetap bruto, yang mencakup investasi infrastruktur, prasarana jalan, pembangkit, mesin-mesin, dan pembelian peralatan, meningkat. Hal ini menandakan perpindahan arah prioritas dari pembuat kebijakan sebagai upaya mempercepat pembangunan. Pada tahun 2011, pembentukan modal tetap bruto tercatat sebesar 32,0 persen dari PDB, di mana angka ini lebih tinggi dari proporsi PDB yang dihabiskan pada pembentukan modal tetap bruto di negara ASEAN lain dan juga lebih tinggi dari rata-rata global, yaitu 19,4 persen (lihat bawah).

Investasi dalam infrastruktur telah meningkat

Gambar 3:
Formasi modal tetap Indonesia dan dunia, 2002-2011



Sumber: Bank Dunia (2012) Indikator Pembangunan Dunia, Bank Dunia, Washington D.C.

Arus masuk Investasi Asing Langsung (FDI) bersih berubah-ubah seiring dengan tren perekonomian global, namun menguat pada beberapa tahun belakangan ini. Pada tahun 2011 arus masuk FDI bersih setara dengan 2,14 persen PDB, tetapi tetap di bawah rata-rata global (2,32 persen tahun 2011).

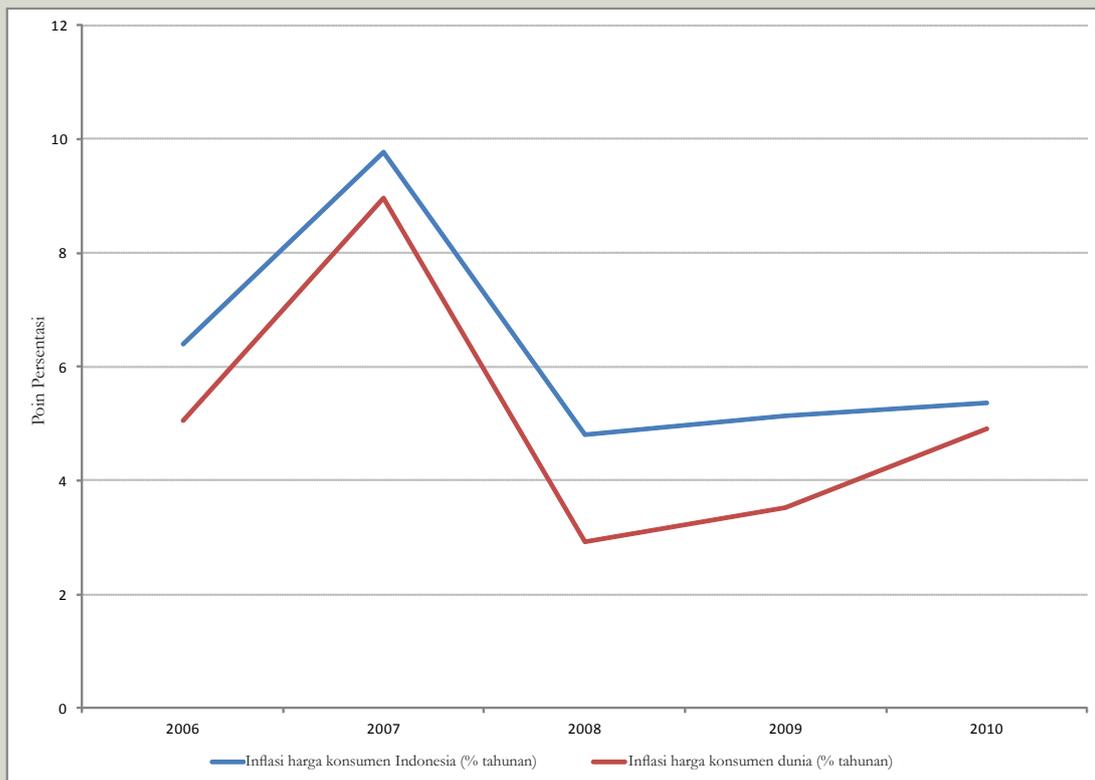
Penerimaan remitansi dari pekerja di luar negeri terus tumbuh pada tahun 2012. Diperkirakan sekitar USD 6,7 juta telah disetorkan pada tahun 2011 dan USD 6,8 juta pada tahun 2012. Remitansi pekerja sering kali digunakan untuk mendukung konsumsi harian dan investasi di usaha kecil dan menengah, dan lebih jauh lagi memainkan peranan penting dalam memelihara permintaan domestik dan mempercepat pertumbuhan.

Di tengah maraknya perdebatan publik, kebijakan finansial Indonesia terus memberikan subsidi besar bagi bahan bakar dan energi pada tahun 2012. Dengan banyaknya pengeluaran akibat subsidi dan kelemahan dalam pengumpulan pendapatan, defisit anggaran tahun 2012 lebih tinggi dari yang diperkirakan. Sistem perpajakan Indonesia meliputi pajak penghasilan, pajak ekspor dan pajak pertambahan nilai. Penerimaan pajak diperkirakan sekitar 11 persen PDB pada tahun 2010, lebih rendah dibandingkan rata-rata global (sekitar 14 persen). Pemerintah berharap mendapatkan penerimaan pajak antara 12,4 persen dan 14,2 persen dari PDB antara tahun 2010 dan 2014. Dukungan lebih jauh untuk menerapkan reformasi pada sistem perpajakan dibutuhkan demi mencapai target.

Inflasi harga konsumen di Indonesia kira-kira 4,3 persen pada 2012, menyerupai tingkat inflasi harga konsumen di negara-negara ASEAN. Fluktuasi baru-baru ini mengikuti tren global, kendati rata-rata global untuk inflasi harga konsumen tetap lebih rendah dibandingkan Indonesia (lihat bawah).

Inflasi harga konsumen terus mengikuti tren internasional

Gambar 4:
Inflasi harga konsumen Indonesia dan dunia, 2006–2010



Sumber: Bank Dunia (2012) Indikator Pembangunan Dunia, Bank Dunia, Washington D.C.

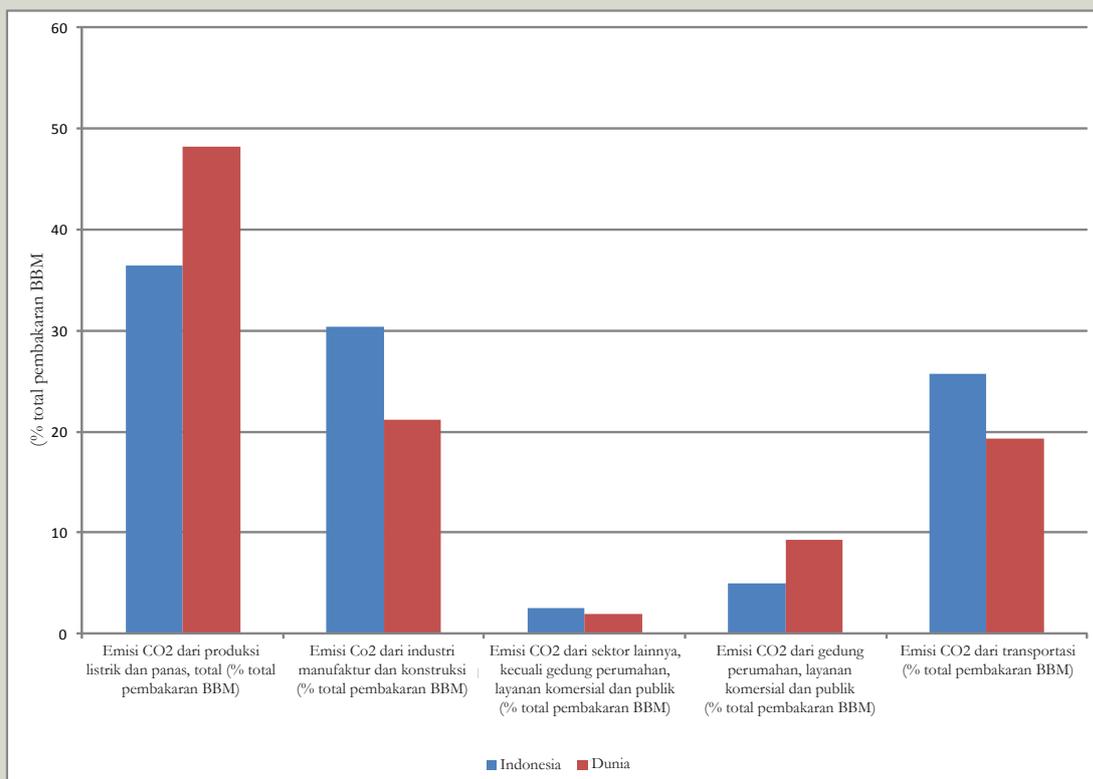
Indonesia telah merumuskan Rencana Aksi Nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen (atau 41 persen dengan bantuan internasional) pada tahun 2020. Lima sektor utama yang ditargetkan adalah kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah. Pada tahun 2005 total emisi GHG untuk tiga jenis utama gas rumah kaca (tanpa Pemanfaatan Lahan, Alih Fungsi Lahan dan Kehutanan /LULUCF) diperkirakan mencapai 665.543 Gg CO₂. Dengan LULUCF, total emisi GHG bersih untuk Indonesia diperkirakan mencapai 1.791.371 Gg CO₂, atau 2,7 kali lebih tinggi.¹ Ini menunjukkan bahwa tantangan utama Indonesia dalam mendukung pembangunan ramah lingkungan dan mengurangi emisi karbon berkaitan dengan konservasi hutan dan alih fungsi.

Indonesia berusaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen (atau 41 persen dengan bantuan internasional) pada tahun 2020

1 Kementerian Lingkungan Hidup – Republik Indonesia (2010), komunikasi kedua Indonesia di bawah UNFCCC, dapat diakses di http://unfccc.int/files/national_reports/nonannex_i_natcom/submitted_natcom/application/pdf/indonesia_snc.pdf

Tanpa LULUCF, sumber utama emisi karbon Indonesia berasal dari sisa pembakaran bahan bakar. Pada tahun 2010 diperkirakan Indonesia memproduksi 410,95 juta metrik ton karbon dari pembakaran bahan bakar, sementara dunia menghasilkan 29.327,7 juta metrik ton. Karbon dari pembakaran bahan bakar biasanya berkaitan dengan energi dari produksi listrik dan panas, diikuti dengan industri manufaktur dan sektor transportasi (lihat bawah). Emisi gas metan diperkirakan 218,929 kilo ton CO₂ pada tahun 2010 dan emisi nitro oksida diperkirakan 91.312 ribu metrik ton CO₂ pada tahun 2010, senilai dengan masing-masing 2,9 persen dari emisi metan global dan 3,2 persen dari emisi nitro oksida.

Gambar 5:
Emisi karbon dari pembakaran bahan bakar di Indonesia dan dunia, 2010



Sumber: Bank Dunia (2012) Indikator Pembangunan Dunia, Bank Dunia, Washington D.C.

Perubahan penggunaan lahan dan degradasi hutan gambut adalah sumber utama dari emisi karbon.

Metodologi dalam memperkirakan emisi karbon masih dalam pengembangan, khususnya untuk alih fungsi lahan dan hutan, sementara perkiraan yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup, Bank Dunia dan Dewan Nasional Perubahan Iklim bervariasi. Namun, Indonesia dianggap sebagai salah satu kontributor terbesar dari emisi gas rumah kaca dunia, terutama akibat dari tingkat deforestasi dan degradasi lahan gambut.

Pada tahun 2011 dan 2012 rasio GINI diperkirakan 0,41², meningkat dari 0,35 pada tahun 2008. Ini menegaskan perlunya perhatian lebih lanjut untuk mendukung pembangunan yang adil. Provinsi dengan perkiraan ketidaksetaraan tertinggi adalah Papua dan Gorontalo, sementara provinsi

2 Indeks Gini adalah ukuran distribusi pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Rasio Gini terletak antara nihil (nol), menggambarkan 'keadilan sempurna' dan satu (1), yang menggambarkan 'ketidakadilan sempurna'.

dengan ketidaksetaraan terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat.

Garis kemiskinan pada tahun 2012 ditetapkan pada Rp. 267.408 untuk daerah perkotaan dan Rp. 229.226 untuk daerah pedesaan. Diperkirakan ada sebanyak 10,65 juta orang hidup di daerah perkotaan dan 18,49 juta orang di wilayah pedesaan yang berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan telah berkurang dengan stabil, dari 11,65 persen di daerah perkotaan dan 19,93 persen di daerah pedesaan pada tahun 2008, menjadi 8,78 persen di daerah perkotaan dan 15,12 persen di daerah pedesaan pada tahun 2012. Indeks keparahan kemiskinan, yang mengukur kesenjangan di antara masyarakat miskin diperkirakan 0,47 pada tahun 2012, menurun dari 0,76 pada tahun 2008, yang juga memperlihatkan adanya perbaikan situasi pada masyarakat miskin.

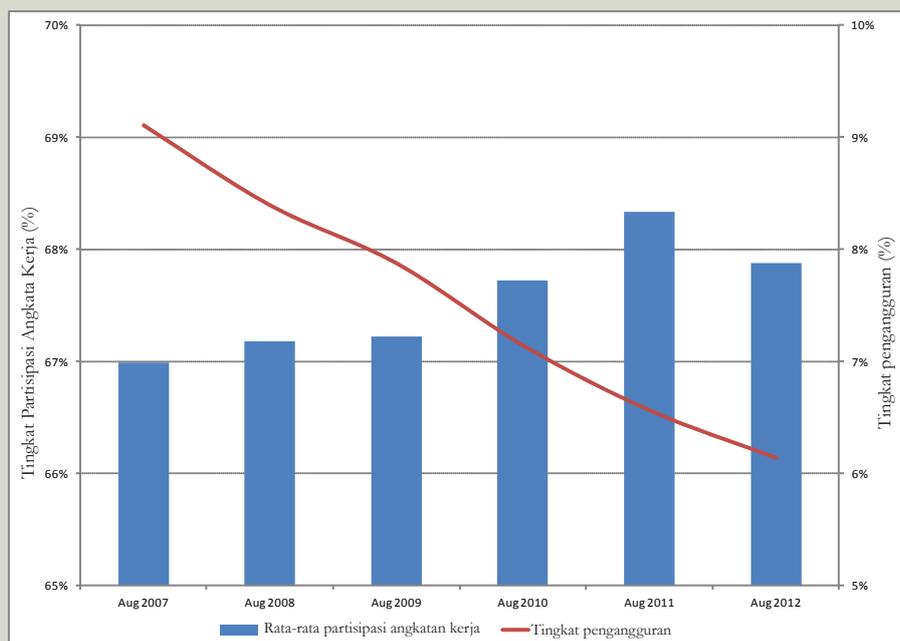
Kemiskinan terus berkurang, namun kesenjangan tetap menjadi perhatian

1.2. Tren pasar tenaga kerja

Pada Agustus 2012 diperkirakan bahwa penduduk Indonesia mencapai 244,75 juta orang, dengan 118,05 juta orang tergolong sebagai ekonomi aktif. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada Agustus 2012 diperkirakan sekitar 67,9 persen, sedikit lebih rendah dari perkiraan tahun 2011 (lihat Gambar di bawah). Meski demikian, pertumbuhan pekerjaan terus melebihi pertumbuhan angkatan kerja, dengan perkembangan pertumbuhan pekerjaan sebesar 1,0 poin persen dan adanya penambahan 1.137.755 pekerjaan antara Agustus 2011 dan Agustus 2012.

Pertumbuhan pekerjaan terus melampaui pertumbuhan tenaga kerja

Gambar 6:
Partisipasi tenagakerja dan pengangguran dalam persen, 2007-2012



Sumber: BPS (2012) Situasi pasar tenaga kerja: Agustus 2012, Badan Pusat Statistik, Jakarta

Secara umum, partisipasi angkatan kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja antara tahun 2011 dan 2012 tidak setinggi antara tahun 2010 dan 2011. Hal ini dapat dikaitkan dengan peningkatan partisipasi penduduk usia kerja dalam pendidikan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, di mana hal ini penting untuk memperkuat produktivitas pekerja dan kualitas tenaga kerja di masa depan. Karenanya, sedikit penurunan dalam menurunnya penduduk usia antara 15 dan 24 tahun yang aktif secara ekonomi antara Agustus 2011 dan Agustus 2012 terkait dengan meningkatnya tingkat pendidikan.

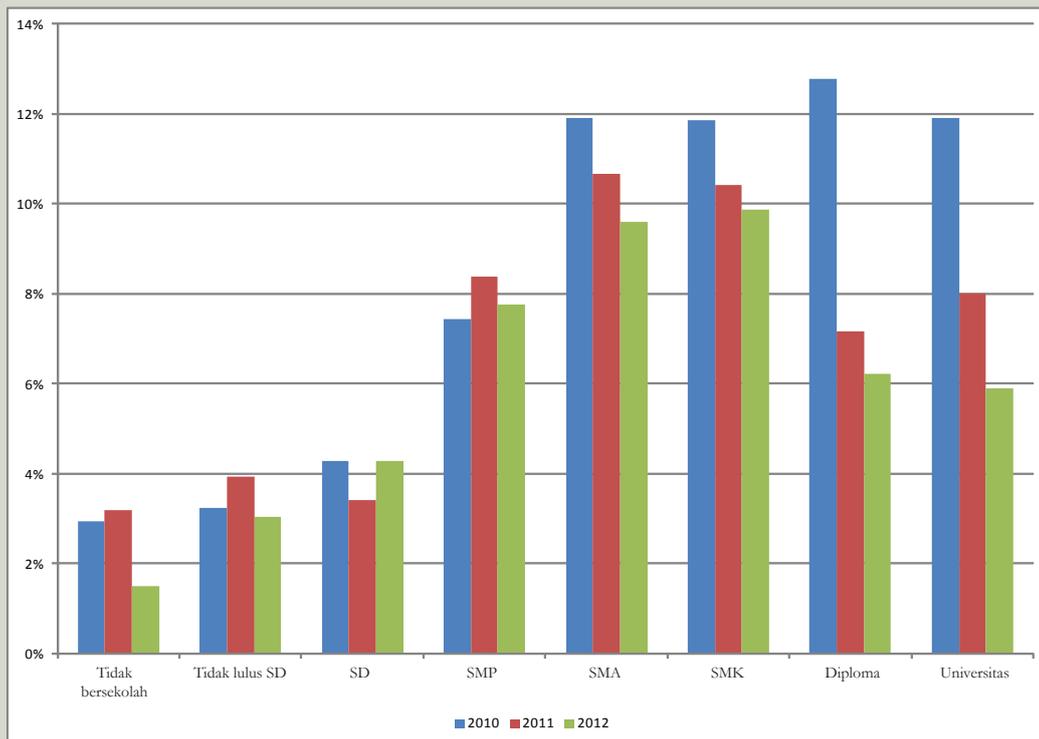
Angkatan kerja tetap menumpuk di pulau Jawa, Sumatera dan Bali (81,2 persen pada tahun 2012). Indonesia menunjukkan ketidakadilan ekonomi dan hasil ketenagakerjaan secara regional. Ketidakadilan dalam pembangunan regional berkaitan dengan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, sumber daya tetap dan isolasi geografis. Pekerjaan umum dan perekonomian cenderung lebih buruk di bagian timur Indonesia.

Variasi rasio kesempatan kerja terhadap penduduk – porsi dari penduduk yang bekerja – berkisar antara 63 dan 65 persen pada tahun 2012, lebih tinggi dari rata-rata global pada tahun 2012, yaitu 60,3 persen. Namun, rasio kesempatan kerja terhadap penduduk untuk usia antara 15 dan 24 tahun diperkirakan 39,7 persen pada Agustus 2012. Ini merupakan persentase terendah sejak tahun 2006. Rasio pekerja-dengan-penduduk untuk usia antara 25 dan ke atas diperkirakan 71,4 persen pada Agustus 2012, yang merupakan persentase tertinggi sejak Krisis Finansial Asia. Selain itu juga terdapat sedikit penurunan pada tingkat pengangguran muda dan angkatan muda yang menunda memasuki pasar tenaga kerja untuk mengenyam pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, turunnya rasio pekerjaan terhadap penduduk untuk angkatan muda bisa menjadi tren positif, jika kebijakan diposisikan untuk mendukung permintaan atas pasokan tenaga kerja yang lebih berpendidikan tinggi.

Pengangguran terus menurun, tetapi tetap tinggi bagi lulusan sekolah menengah atas yang menunjukkan kebutuhan untuk lebih fokus pada transisi dari sekolah ke bekerja

Pada tahun 2012 tingkat pengangguran menurun dari 6,32 persen pada bulan Februari menjadi 6,14 persen pada bulan Agustus. Kemungkinan besar yang menjadi penganggur pada tahun 2012 hanya memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah atas sebagai pendidikan tertingginya. Tingginya pengangguran bagi lulusan sekolah menengah atas dapat dikaitkan dengan faktor-faktor seperti kurangnya permintaan dan ketidaksesuaian keterampilan. Ini artinya kuantitas pekerjaan dan pekerjaan yang tersedia dalam pasar tenaga kerja mungkin tidak sesuai dengan jenis dan tingkat keterampilan lulusan sekolah menengah atas. Peningkatan akses untuk mendukung layanan yang berhubungan dengan transisi dari sekolah ke bekerja, seperti orientasi karir, bimbingan kerja, kesempatan magang dan basis data penawaran-permintaan pekerja, dapat membantu meningkatkan prospek pasar tenaga kerja bagi lulusan sekolah menengah atas. Perubahan lebih jauh dibutuhkan untuk memperkuat efektivitas kebijakan transisi dari sekolah ke bekerja, demi memastikan para lulusan sekolah siap untuk bekerja.

Gambar 7:
Tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan, 2010-2012



Sumber: BPS (2012) Situasi pasar tenaga kerja di Indonesia: Agustus 2012, Badan Pusat Statistik, Jakarta

Pengangguran juga menurun tajam pada diploma dan lulusan universitas. Ini menunjukkan bahwa permintaan atas pekerja terampil dan terdidik meningkat seiring dengan termodernisasinya perekonomian ekonomi Indonesia.

Pengangguran menurun di hampir seluruh provinsi antara Agustus 2011 dan Agustus 2012, dengan catatan pengecualian di Aceh dan Sulawesi Tenggara. Pengangguran meningkat di Aceh dari 7,43 persen pada Agustus 2011 menjadi 9,10 persen pada Agustus 2012, sementara pengangguran di Sulawesi Tenggara meningkat dari 3,06 persen menjadi 4,04 persen pada periode yang sama. Pengurangan pada tingkat pengangguran sangat terlihat di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Riau, Kalimantan Timur dan Papua Barat – seluruhnya dianggap sebagai pusat pertumbuhan penting dalam MP3EI milik pemerintah. Secara khusus, layak diperhatikan bahwa pengangguran di DKI Jakarta diperkirakan 9,87 persen pada Agustus 2012, dan untuk pertama kalinya pengangguran di Jakarta berada di bawah 10 persen dalam sepuluh tahun terakhir.

Pengangguran di DKI Jakarta telah mencapai tingkat terendah dalam 10 tahun

Meskipun tren menurun, pengangguran tetap tinggi untuk angkatan muda. Pada tahun 2012 terjadi sedikit penurunan untuk pengangguran antara umur 15 dan 24 tahun. Pengangguran angkatan muda kira-kira 19,08 persen pada Februari 2012 dan 19,56 persen pada Agustus, turun dari 23,92 persen pada Februari 2011 dan 19,99 persen pada Agustus 2011. Lebih dari

Hasil perekrutan muda meningkat, namun kaum muda tetap 5,9 kali lebih cenderung

*menganggur
dibandingkan
mereka yang berusia
25 tahun ke atas*

itu, perlu diperhatikan bahwa angkatan muda masih 5,97 kali lebih besar menjadi pengangguran dibandingkan mereka yang berusia 25 tahun ke atas, dan angkatan muda terhitung 56 persen dari penduduk pengangguran pada Agustus 2012.

Pengangguran angkatan muda telah turun dari puncak 33,4 persen pada tahun 2005, dan pergeseran pada hasil pasar tenaga kerja untuk angkatan muda terkait erat dengan membaiknya kondisi ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga dan pengembalian atas pendidikan. Oleh sebab itu, tingkat partisipasi angkatan muda di pasar tenaga kerja menurun, seiring meningkatnya kaum muda yang memilih untuk menunda masuk ke pasar tenaga kerja demi meningkatkan pendidikan.

*Keuntungan yang
cepat diperlukan
dalam prestasi
pendidikan untuk
meningkatkan daya
saing tenaga kerja
Indonesia dalam
konteks integrasi
ASEAN*

Prestasi pendidikan dari penduduk yang aktif secara ekonomi telah berangsur-angsur meningkat seiring waktu (lihat tabel di bawah). Secara khusus, tingkat pendaftaran sekolah untuk pendidikan sekunder dan tersier meningkat di kalangan generasi muda. Rata-rata tahun sekolah dari generasi saat ini di Indonesia lebih-kurang sebanding dengan negara lain di wilayah Asia Tenggara. Namun, Indonesia masih memiliki tenaga kerja dengan prestasi pendidikan sederhana. Sebagai contoh, hanya sekitar 9,0 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi di Indonesia mencapai sekolah menengah atas atau pendidikan perguruan tinggi. Indonesia perlu meningkatkan proporsi dari penduduk yang aktif secara ekonomi dengan lulusan sekolah menengah atas dan pendidikan tinggi secara cepat demi mencapai tujuan yang tercantum dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan dapat bersaing dengan konteks integrasi ASEAN.

Tabel 1:
Prestasi pendidikan dari penduduk yang aktif secara ekonomi dalam persen, 2010-2012

Prestasi pendidikan	Agustus 2010	Agustus 2011	Agustus 2012
Tidak sekolah	4,6	5,1	4,6
SD dan di bawah	63,2	62,0	61,3
SMP	24,1	24,8	25,1
SMA dan di atas	8,1	8,2	9,0
Total	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS (2012) Indikator pasar tenaga kerja Indonesia: Agustus 2012, Badan Pusat Statistik: Jakarta

*Kesenjangan
regional terus
berlanjut,
memerlukan
intervensi dari sisi
permintaan dan
penawaran*

Patut dicatat, intervensi dibutuhkan untuk meningkatkan fungsi kedua sisi permintaan dan penawaran dari ekonomi. Area yang memiliki sejarah dari ekonomi lokal yang lesu bisa dijelaskan dengan situasi di mana kedua sisi permintaan dan penawaran memroses interaksi untuk menjaga kondisi yang berlaku. Kemiskinan yang tinggi dan rendahnya tingkat sumber daya manusia bisa membuat daerah menjadi tidak menarik bagi investor dan pengusaha. Pengalaman menunjukkan bahwa usaha mendukung pembangunan melalui

kegiatan ketenagakerjaan dan kewirausahaan perlu dipasangkan dengan strategi pembangunan sehingga pelatihan keterampilan tidak berakhir dengan ‘pergolakan’ dari pasar tenaga kerja – hal ini tidak disertai dengan peningkatan berkelanjutan pada mata pencaharian dan inovasi dalam pembangunan ekonomi. Karenanya penting untuk memberdayakan aktor-aktor lokal agar dapat menentukan strategi-strategi yang sesuai dengan kondisi setempat dan dapat menggerakkan perekonomian lokal menuju model yang lebih adil dan berkelanjutan. Pengembangan sumber daya manusia dan usaha karenanya memiliki peran yang tidak terpisahkan.

Jumlah jam kerja yang digunakan pekerja memiliki dampak pada kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dari penduduk pekerja dan biaya kerja perusahaan. Pemahaman tren jumlah jam kerja dari individual dan kelompok pekerja yang berbeda sangat penting untuk memantau kondisi kerja dan kehidupan. Pekerja paruh waktu meningkat di Indonesia dan telah memainkan peran penting dalam memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Pada Agustus 2012, pekerja paruh waktu terhitung 19,42 persen dari penduduk pekerja, memperlihatkan keberlanjutan tren dalam perkembangan kerja paruh waktu di Indonesia. Pekerja paruh waktu kira-kira 19,21 persen pada tahun 2011, menggambarkan berlanjutnya pertumbuhan dari 16,7 persen pada tahun 2010, 15,4 persen pada tahun 2009 dan 15,7 persen pada tahun 2008. Penelitian lebih lanjut pada tren ini dibutuhkan agar dapat memahami secara lebih baik profil pekerja paruh waktu serta sejauh mana faktor permintaan dan penawaran memainkan peran pada peningkatan kerja paruh waktu.

Pekerja paruh waktu, didefinisikan sebagai pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, dapat menjadi batu loncatan menjadi pekerja permanen dan tetap. Perlu dicatat, kendati demikian, pekerja paruh waktu tidak memungkinkan mendorong konsumsi dan permintaan seperti yang dilakukan pekerja tetap akibat perbedaan upah. Adanya pekerja paruh waktu bisa merupakan sebuah konsekuensi dari ketidakpastian ekonomi dan indikasi adanya kebutuhan yang lebih besar akan fleksibilitas di tempat kerja sebagai upaya mengurangi upah pekerja dan mengatasi fluktuasi permintaan. Kontrak jangka pendek dan sub-kontrak juga memberikan fleksibilitas bagi pengusaha di tempat kerja.

Orang yang bekerja paruh waktu mempunyai pilihan untuk memberikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Sebagian pekerja ingin menambah waktu kerja dan ini dapat dianggap sebagai pengangguran terselubung yang “berhubungan dengan waktu” (bekerja kurang dari 35 jam dan bersedia untuk bekerja dengan waktu tambahan). Pada Agustus 2011, sebesar 11,52 persen dari penduduk pekerja dianggap sebagai pengangguran terselubung, yang turun dari Agustus 2011 (12,33 persen) dan Agustus 2010 (14,10 persen). Pekerja paruh waktu dan pengangguran terselubung lebih umum terjadi di kalangan perempuan dibandingkan laki-laki dan juga lebih umum terjadi di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan.

Kerja paruh waktu telah meningkat secara drastis, sementara setengah pengangguran terus berkurang secara stabil di Indonesia

Banyak orang di Indonesia bekerja dengan jam kerja yang panjang dan bahkan berlebihan. Jam kerja yang panjang, yaitu lebih dari 40 jam per minggu seperti tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13/2003. Jam kerja lebih dari 48 jam per minggu dianggap berlebihan, seperti tercantum dalam Konvensi ILO No. 1 dan No. 30. Pada Agustus 2012, sebesar 29,4 persen dari pekerja bekerja antara 40 hingga 48 jam per minggu, 15,09 persen bekerja 49 hingga 59 jam dan 11,44 persen bekerja lebih dari 60 jam. Secara keseluruhan 55,96 persen pekerja bekerja lebih dari 40 jam per minggu pada Agustus 2012, yang konsisten dengan jumlah pekerja yang bekerja dengan jam kerja panjang dan berlebihan pada tahun-tahun sebelumnya.

Pekerja rentan diukur berdasarkan status pekerjaan yang mengindikasikan kualitas pekerjaan dan kerentanan mata pencaharian. Indonesia mendefinisikan pekerja rentan dengan mencakup pekerja mandiri, pekerja musiman dan pekerja keluarga yang tidak dibayar.³ Pekerja rentan sama sekali tidak menikmati manfaat dari regulasi pasar kerja dan sistem perlindungan sosial seperti para pekerja yang menerima upah dan gaji. Mereka biasanya bekerja di perekonomian informal, rentan terhadap fluktuasi pendapatan dan memiliki daya beli yang terbatas.

Pada tahun 2012, antara 60 hingga 63 persen dari keseluruhan pekerja dapat dianggap sebagai “pekerja rentan”.

Tren global menunjukkan bahwa pekerja miskin telah mengalami penurunan besar seiring waktu, namun situasi pekerja rentan relatif stagnan. Laporan ILO tentang Tren Ketenagakerjaan Global yang diterbitkan pada tahun 2013 memperkirakan bahwa pada tahun 2012, sebesar 59 persen dari mereka yang bekerja di negara berkembang merupakan pekerja rentan dan 61,4 persen dari keseluruhan pekerja di Asia Tenggara dan Pasifik merupakan pekerja rentan. Pekerjaan rentan di Indonesia diperkirakan lebih tinggi dari kedua kategori jumlah tersebut. Pada tahun 2012 diperkirakan 60 hingga 63 persen dari mereka yang bekerja bisa dikategorikan sebagai “pekerja rentan” (lihat tabel di bawah). Situasi pada tahun 2012 menunjukkan perkembangan solid dari tahun 2011, dengan perkiraan pekerjaan sebesar 65,76 persen pada Februari dan 62,17 persen pada Agustus.

3 Definisi Indonesia untuk pekerja rentan dengan definisi ILO untuk pekerja rentan sedikit berbeda. ILO mendefinisikan pekerja rentan sebagai jumlah pekerja mandiri dan menggunakan pekerja keluarga, sementara Indonesia juga menambahkan pekerja musiman dan pengusaha yang dibantu oleh pekerja sementara/pekerja cuma-cuma dalam definisinya untuk pekerja rentan. Hal ini karena kebiasaan pekerjaan di Indonesia, yang sering kali informal dengan kondisi kerja yang tidak layak, dan biasanya memiliki pendapatan tidak layak, produktivitas rendah dan kondisi kerja di bawah hak-hak dasar pekerja.

Tabel 2:
Presentase pekerja dalam pekerjaan rentan tahun 2012

Laki-laki dan Perempuan	Februari	Maret	Agustus
a) Pekerja	33,81	34,05	36,36
b) Pengusaha	48,91	49,24	47,49
i) Perusahaan	3,48	3,9	3,5
ii) Pekerja mandiri	35,38	34,81	33,57
iii) Pekerja musiman	10,04	10,53	10,42
c) Pekerja keluarga	17,29	16,71	16,15
d) Pekerja rentan (ii + iii + c)	62,71	62,05	60,14
Laki-laki	Februari	Maret	Agustus
a) Pekerja	35,65	35,8	38,18
b) Pengusaha	56,88	56,92	54,8
i) Perusahaan	4,52	5,03	4,58
ii) Pekerja mandiri	40,2	39,06	37,48
iii) Pekerja musiman	12,15	12,83	12,75
c) Pekerja keluarga	7,47	7,28	7,01
d) Pekerja rentan (ii + iii + c)	59,83	59,17	57,24
Perempuan	Februari	Maret	Agustus
a) Pekerja	30,85	31,23	33,35
b) Pengusaha	36,12	36,81	35,37
i) Perusahaan	1,82	2,07	1,71
ii) Pekerja mandiri	27,65	27,93	27,12
iii) Pekerja musiman	6,65	6,81	6,55
c) Pekerja keluarga	33,03	31,96	31,28
d) Pekerja rentan (ii + iii + c)	67,33	66,7	64,95

Sumber: BPS (2012) Indikator pasar tenaga kerja Indonesia: Agustus 2012, Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Analisis lebih jauh dari pekerja berdasarkan gender menunjukkan adanya perbedaan dalam kerentanan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, serta sifat dan komposisi pekerjaan rentan juga jauh berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, tingkat pekerjaan rentan perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki, dengan jarak perbedaan antara 7,5 dan 7,7 poin persen pada tahun 2012. Perempuan juga tiga kali lebih mungkin dikategorikan sebagai pekerja rentan karena statusnya sebagai pekerja keluarga, sementara laki-laki lebih mungkin dikategorikan sebagai pekerja rentan karena statusnya sebagai pekerja mandiri atau pekerja musiman.

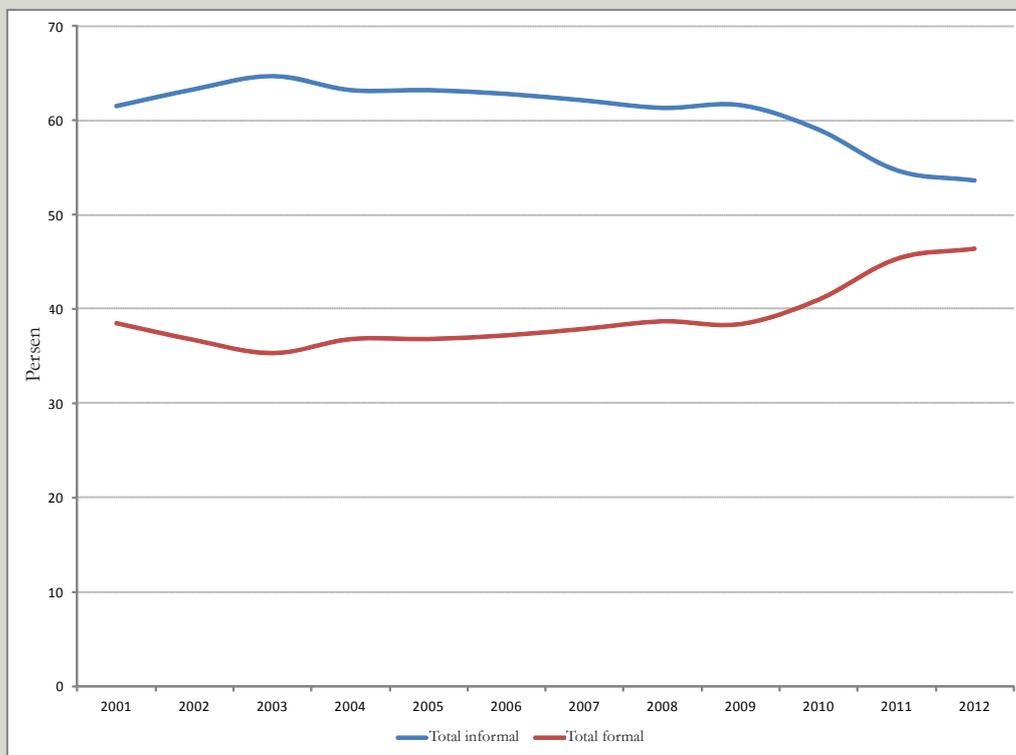
Perempuan juga cenderung tiga kali lebih dianggap sebagai pekerja rentan karena status mereka sebagai pekerja keluarga dibandingkan laki-laki.

Mengingat sulitnya transisi dari pekerja keluarga ke pekerjaan di luar keluarga, dimensi gender dari pekerja rentan di Indonesia membutuhkan perhatian khusus dari para pembuat kebijakan.

Tren selama tiga tahun terakhir melihat pergeseran yang lambat menuju formalitas pada ekonomi Indonesia

Antara tahun 2001 dan 2009 jumlah pekerjaan yang berada di perekonomian informal relatif stabil; 61 hingga 66 persen dari keseluruhan pekerjaan yang ada berada di dalam perekonomian informal pada periode ini. Namun, tren dalam tiga tahun terakhir ini memperlihatkan adanya pergeseran ke arah formalitas dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2010 diperkirakan 59,0 persen pekerja bekerja di ekonomi informal. Pada tahun 2011 dan 2012 tren ini berlanjut, dengan perkiraan pekerjaan informal sebesar 54,7 persen dan 53,6 persen. Formalitas telah menjadi isu penting bagi pasar tenaga kerja Indonesia, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mereformasi pendidikan dan mengurangi hambatan atas formalitas selama lebih tiga tahun belakangan ini. Sebagai contoh, investasi infrastruktur dipercepat, akses atas pendidikan primer saat ini mendekati lengkap dan program sertifikasi guru telah dijalankan. Tren meningkatnya formalitas di Indonesia sangat menarik dan dapat memberikan informasi bagi negara tetangga di wilayah sama yang juga menginginkan perpindahan ke perekonomian formal.

Gambar 8:
Pekerjaan formal dan informal antara 2001 dan 2012, dalam persen

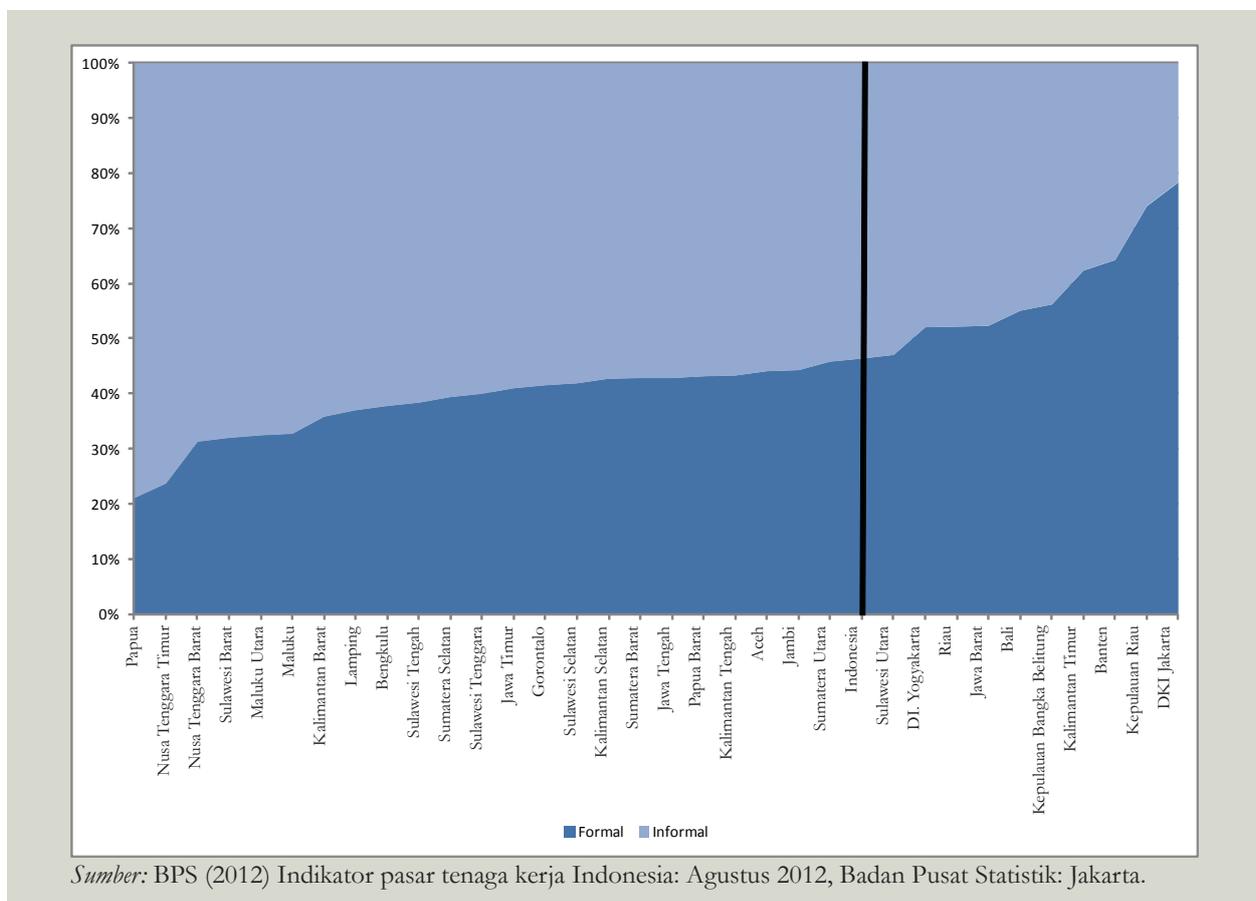


Sumber: BPS (2012) Indikator pasar tenaga kerja Indonesia: Agustus 2012, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Tren juga menunjukkan bahwa akses laki-laki dan perempuan pada pekerjaan formal telah meningkat tinggi seiring waktu, tetapi hasilnya masih tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2001, 67,5 persen pekerja perempuan dan 57,9 persen pekerja laki-laki bekerja di perekonomian informal. Pada tahun 2012, 57,5 persen pekerja perempuan dan 51,2 persen pekerja laki-laki bekerja di perekonomian informal. Pekerjaan informal bagi perempuan menurun jauh lebih cepat dibandingkan laki-laki, namun, usaha lebih jauh dibutuhkan untuk menjembatani perbedaan gender dan memastikan bahwa baik pekerja laki-laki maupun perempuan memiliki akses yang sama terhadap pekerjaan di perekonomian formal, mengingat pekerjaan formal umumnya berhubungan dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik.

Sejauh mana kegiatan ekonomi memperoleh tempat dalam perekonomian formal atau informal juga menunjukkan ketidaksetaraan regional, dengan perkiraan formalitas tertinggi ada di DKI Jakarta (78,43 persen), diikuti Kepulauan Riau (74,10 persen) dan yang terendah di Papua (22,10 persen), diikuti Nusa Tenggara Timur (23,75 persen). Sisi keuntungan dari perekonomian informal pada tahun 2012 adalah 53,57 persen sementara perekonomian formal 46,43 persen.

Gambar 9:
Formalitas berdasarkan provinsi dalam persen, Agustus 2012



Sumber: BPS (2012) Indikator pasar tenaga kerja Indonesia: Agustus 2012, Badan Pusat Statistik: Jakarta.

*Penyesuaian
struktural terus
berkembang*

Pergeseran struktural pada komposisi sektoral dari perekonomian Indonesia terus berkembang pada tahun 2012, dengan pekerjaan di sektor pertanian menurun dan pekerjaan di sektor jasa meningkat (lihat tabel di bawah). Investasi publik dan sektor swasta berkembang dengan cepat, dan dengan hasil pertumbuhan pekerjaan pada sektor konstruksi. Pekerjaan di sektor keuangan, asuransi, properti dan jasa terus berkembang, dan saat ini sektor-sektor tersebut mempekerjakan hampir dua kali jumlah pekerja yang diperkerjakan tahun 2008. Pertumbuhan dapat ditandai dari reformasi sektoral yang secara sukses menciptakan kestabilan dan memperkuat pemerintahan. Sebagai contoh, regulasi ditempatkan di tempat yang lebih ketat untuk menghubungkan perluasan ke modal dasar. Pengamanan untuk memastikan bahwa setidaknya 20 persen dari portofolio bank menuju ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah juga harus diperkenalkan.

Tabel 3:
Ketenagakerjaan berdasarkan sektor 2008-2012 dalam persen

Sektor	2008	2009	2010	2011	2012
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	40,30	39,68	38,35	35,86	35,09
Pertambangan dan Penggalan	1,04	1,10	1,16	1,34	1,44
Manufaktur	12,24	12,24	12,78	13,26	13,87
Listrik, Gas dan Air	0,20	0,21	0,22	0,22	0,22
Konstruksi	5,30	5,23	5,17	5,78	6,13
Perdagangan Grosir, Perdagangan Ritel, Restoran dan Hotel	20,69	20,93	20,79	21,33	20,90
Transportasi, Penyimpanan dan Komunikasi	6,03	5,83	5,19	4,63	4,51
Layanan Keuangan, Asuransi, Properti dan Bisnis	1,42	1,42	1,61	2,40	2,40
Layanan Komunitas, Sosial, dan Pribadi	12,77	13,35	14,75	15,18	15,43
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS (2012) Situasi Pasar tenaga kerja di Indonesia: Agustus 2012, Badan Pusat Statistik, Jakarta

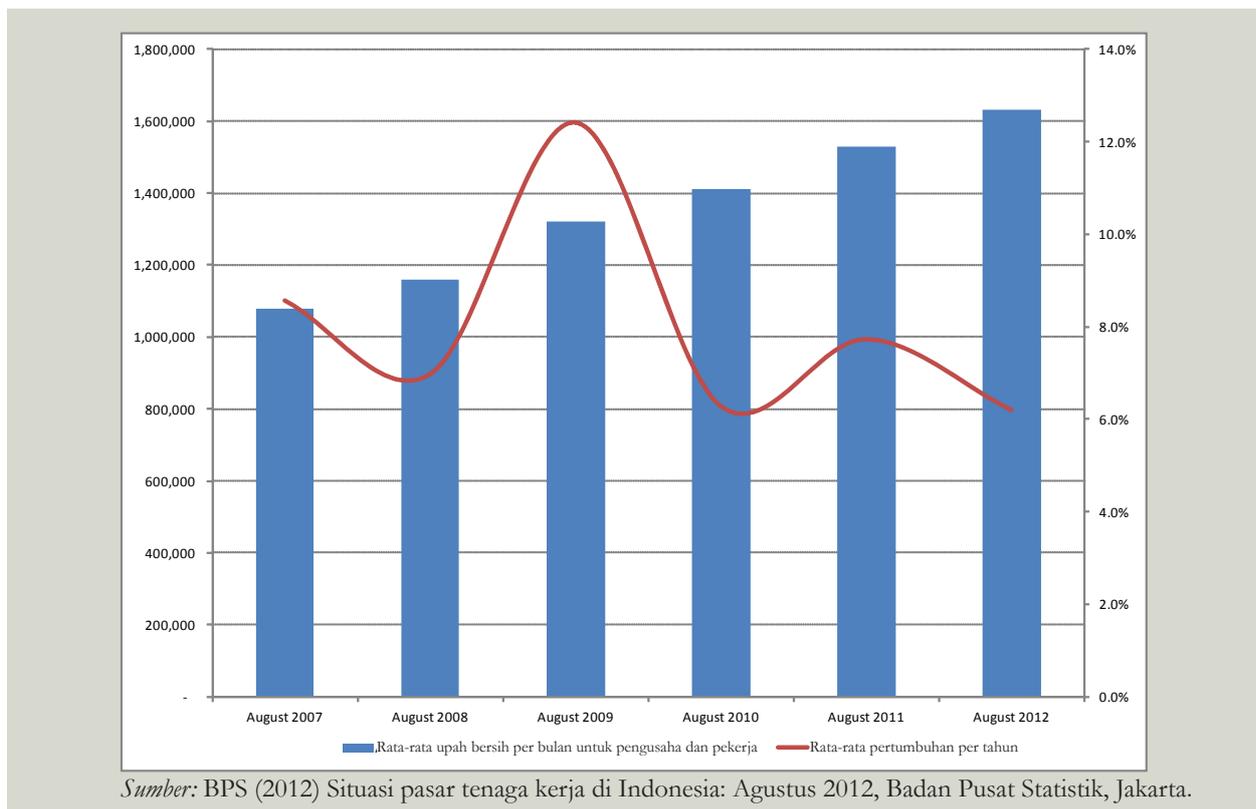
*Pekerjaan pada
sektor manufaktur
telah berkembang
dan sekarang
mencapai 10 tahun
tertinggi*

Pekerjaan di sektor manufaktur berkembang secara cepat dan saat ini lebih tinggi (dalam hal pembagian sektoral dan angka mutlak) dari yang pernah ada dalam dekade terakhir. Pembuat kebijakan telah lama berupaya untuk menstimulasi sektor manufaktur guna mengembalikan statusnya seperti sebelum tahun 1998, ketika sektor ini menjadi penggerak ekonomi dan pertumbuhan di Indonesia. Namun, komposisi struktural dari sektor manufaktur saat ini berbeda dari 15 tahun lalu. Banyak kegiatan intensif pekerja, seperti manufaktur tekstil, kulit, garmen dan sepatu yang stagnan, sementara manufaktur makanan (termasuk pemrosesan minyak sawit) dan manufaktur yang lebih padat modal (seperti manufaktur mesin dan pemrosesan zat kimia) berkembang.

Nominal rata-rata meningkat dengan stabil selama beberapa tahun terakhir; pada Agustus 2012 nominal upah rata-rata per bulan untuk pekerja dan buruh kira-kira berkisar Rp. 1.630.193. Ini meningkat 6,2 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan nominal upah rata-rata dipersiapkan pada tahun 2013 dengan mengalihkan kenaikan signifikan pada upah minimum pada triwulan terakhir tahun 2012 di seluruh Indonesia.

Nominal upah rata-rata adalah Rp. 1,6 juta pada Agustus 2012, naik sebesar 6,2 persen dari tahun lalu

Gambar 10:
Upah nominal rata-rata untuk pekerja dan buruh, 2007-2012



Secara umum, peningkatan upah di Indonesia memiliki laju tetap dengan indeks harga konsumen di tahun-tahun terakhir, dengan pengecualian tahun 2005 dan 2008. Sebagai contoh, pada tahun 2012 indeks harga konsumen 4,3 persen dan nominal upah minimum lebih tinggi, pada 6,2 persen. Namun, inflasi untuk komoditi harian, khususnya makanan, sangat tinggi dibandingkan tingkat inflasi keseluruhan, yang berdampak besar pada daya beli pekerja miskin. Penelitian lebih jauh pada pola konsumsi dari pekerja miskin dan pemisahan ukuran inflasi dibutuhkan untuk pemahaman lebih mendalam terhadap hubungan antara pertumbuhan upah dan inflasi bagi berbagai pekerja di Indonesia. Pada tahun 2012, upah rata-rata nominal per bulan untuk pekerja dan buruh adalah 45,4 persen lebih tinggi dibandingkan rata-rata upah minimum untuk Indonesia.

Pada tahun 2012, upah rata-rata nominal per bulan untuk pekerja dan buruh adalah 45,4 persen lebih tinggi dibandingkan rata-rata upah minimum untuk Indonesia

Pada tingkat lokasi, provinsi dengan upah nominal rata-rata tertinggi untuk pekerja dan buruh tahun 2012 dipegang Papua, diikuti Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Jakarta dan Papua Barat. Provinsi dengan nominal upah rata-rata terendah untuk pekerja dan buruh dipegang Jawa Tengah,

diikuti Lampung dan Jawa Timur. Provinsi dengan pertumbuhan nominal upah tertinggi pada tahun 2012 adalah Jambi dengan 8,8 persen, yang merupakan akibat dari peningkatan upah minimum provinsi antara tahun 2011 dan 2012. Provinsi dengan tingkat pertumbuhan terendah untuk nominal upah tahun 2012 termasuk Sulawesi Utara (2,2 persen), Kepulauan Riau (2,6 persen) dan Sulawesi Tenggara (3,8 persen), serta semua provinsi yang sebelumnya memiliki pertumbuhan tinggi dalam nominal upah rata-rata (di atas 13 persen) pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2012 upah rata-rata minimum untuk Indonesia diperkirakan Rp. 1.121.460 (BPS, 2012), naik sebesar 11,8 persen dari tahun sebelumnya. Upah minimum tertinggi ada di Jakarta, Papua, Papua Barat dan Aceh, sementara upah minimum terendah ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Tabel 4:
Upah minimum rata-rata dan upah nominal rata-rata Indonesia, 2010-2012

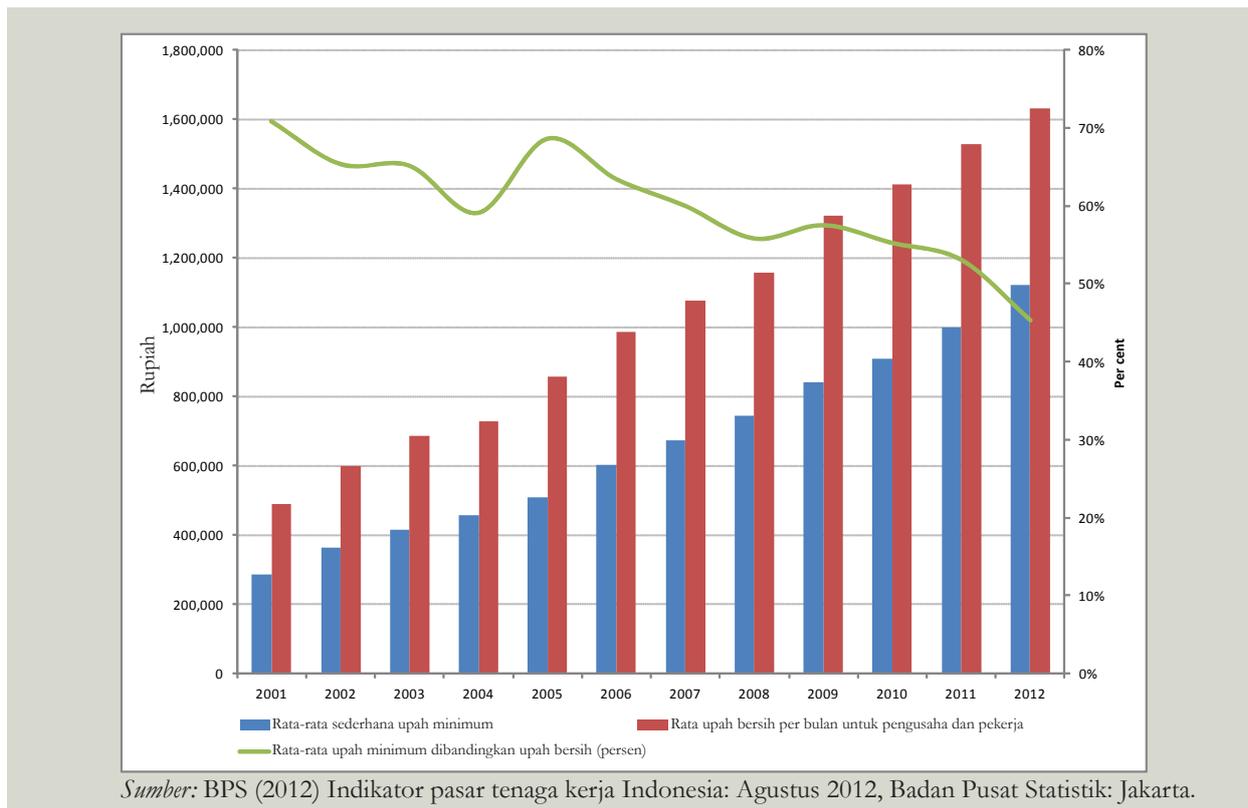
Tahun	Nominal upah rata-rata untuk pekerja dan buruh (Agustus)	Upah minimum rata-rata untuk Indonesia
2010	1.410.982	908.800
2011	1.529.161	988.829
2012	1.630.193	1.121.460

Sumber: BPS (2012) Indikator pasar tenaga kerja Indonesia: Agustus 2012, Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Rata-rata upah nominal per bulan untuk pekerja dan buruh 45,4 persen lebih tinggi dibandingkan upah minimum rata-rata Indonesia pada tahun 2012. Pada tahun 2011, nominal upah rata-rata per bulan untuk pekerja dan buruh 53 persen lebih tinggi dibandingkan upah minimum rata-rata, menandakan bahwa pertumbuhan upah melambat pada tahun 2012.

Seiring waktu, perbedaan antara upah minimum rata-rata dan upah menengah mengecil. Sebagai gambaran, tahun 2001 upah minimum rata-rata secara sederhana adalah Rp. 488.788; upah rata-rata 70,8 persen lebih tinggi dibandingkan upah minimum, dan tren perbedaan ini berlanjut hingga tahun 2012. Hal ini menandakan bahwa meski kenaikan upah minimum tetap mengikuti kecepatan inflasi, posisi keseluruhan dari pekerja menurun.

Gambar 11:
Tren upah menengah dan minimum Indonesia, 2001-2012



Upah laki-laki dan perempuan meningkat secara berangsur-angsur sepanjang tahun 2012, dengan upah rata-rata bagi pekerja laki-laki meningkat 2,9 persen sementara pekerja perempuan meningkat 3,3 persen antara Februari 2012 dan Agustus 2012. Di balik tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi bagi upah perempuan pada tahun 2012, kesenjangan kesetaraan upah yang besar tetap terjadi antara pekerja laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2012, upah laki-laki diperkirakan 26 persen lebih tinggi dibandingkan upah perempuan, dengan laki-laki diperkirakan menerima Rp. 1,7 juta dalam upah rata-rata sepanjang tahun dan perempuan diperkirakan menerima Rp. 1,3 juta.

Tabel 5:
Upah rata-rata pekerja berdasarkan gender dan lokasi, 2012

Variabel	Februari	Maret	Agustus
Laki-laki	1.707.229	1.727.777	1.756.606
Perempuan	1.346.733	1.365.545	1.390.681
Perkotaan	1.718.710	1.740.869	1.761.303
Pedesaan	1.267.024	1.298.924	1.324.900
Total	1.580.882	1.600.808	1.630.193

Sumber: BPS (2012) Indikator pasar tenaga kerja Indonesia: Agustus 2012, Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Terdapat juga ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Upah rata-rata untuk pekerja pada tahun 2012 di daerah perkotaan diperkirakan 33 dan 35 persen lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Upah pedesaan juga mengalami fluktuasi musiman; upah rata-rata pekerja perkotaan meningkat 2,5 persen antara Februari 2012 dan Agustus 2012, sementara upah dari pekerja pedesaan meningkat 4,6 persen.

Upaya untuk menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan

2.1 Pentingnya kualitas tenaga kerja untuk pembangunan yang adil⁴

Indonesia telah menjadi pemain kuat di perekonomian dunia. Pada tahun 2011 Indonesia meningkatkan statusnya menjadi negara berpenghasilan menengah sejalan dengan PDB per kapita yang melampaui USD 3000 per tahun. Pertumbuhan ekonomi tetap kuat dan Krisis Finansial Global tahun 2008 memberikan dampak terbatas pada indikator makro-ekonomi. Indonesia berada dalam jalur untuk mendapatkan target pengurangan kemiskinan (antara delapan dan sepuluh persen tahun 2014) dan target pengurangan pengangguran (antara lima dan enam persen tahun 2014).

Meskipun ada indikator positif tersebut, riset menemukan bahwa Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam elastisitas pertumbuhan-ke-pekerjaan di seluruh sektor ekonomi sejak krisis finansial Asia 1998 (lihat tabel di bawah). Pengangguran terselubung terus ada dan kesempatan kerja di ekonomi formal dan perlindungan sosial, lambat berkembang. Tren ini memiliki implikasi penting untuk persamaan dan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Meskipun Indonesia tetap berada pada jalur dalam mencapai target pengurangan nilai pengangguran, Indonesia mengalami tantangan dalam memberikan pekerjaan berkualitas

Tabel 6:
Elastisitas output ketenagakerjaan berdasarkan sektor

Sektor	Pra-krisis 1993-97	Paska-krisis 2000-06	Periode pertama SBY 2005-09
Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan	1,576	1,132	0,653
Pertambangan dan penggalian	0	0,492	0,287
Listrik, gas, dan air	0		0,825

⁴ Bab ini, bagian dari Laporan Tren Pekerja dan Sosial dibuat atas kontribusi dari Tadjoeddin, Z. (2012) Pekerjaan layak: Dalam kualitas pekerja di Indonesia, University of Western Sydney, Sydney (prasaran tidak diterbitkan); dan ILO (2011) Profil pekerjaan layak negara: Indonesia, International Labour Organization, Jenewa.

Sektor	Pra-krisis 1993-97	Paska-krisis 2000-06	Periode pertama SBY 2005-09
Manufaktur	2,488	0,408	0
Konstruksi	0,931	0,563	0,753
Perdagangan grosir, perdagangan ritel, restoran, dan hotel	1,345	0,874	0 , 5 2 4
Transportasi, penyimpanan, dan komunikasi	1,16	0,703	0
Layanan keuangan, asuransi, real estate, dan bisnis	1,008	0,632	0
Layanan komunitas, sosial, dan pribadi	0,411	0,316	0,460

Sumber: dikumpulkan dari Tadjoeuddin (2011) Pembuatan dan Penerapan dari Kebijakan Ketenagakerjaan Nasional: Pelajaran dari Indonesia, International Labour Office: Jenewa (Laporan tidak diterbitkan).

Pengangguran dan kemiskinan telah banyak digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan; akan tetapi, pengukuran diperlukan untuk lebih memahami dinamika pertumbuhan dan pembangunan

Sebagai contoh, lebih dari satu dekade terakhir perkembangan pada kesempatan kerja tercampur, terutama pada tiga bidang penting: gender, usia, dan pekerjaan informal. Pekerja muda menghadapi tantangan serius dalam pasar tenaga kerja, meskipun situasi keseluruhan sudah meningkat sejak 2005. Hanya penurunan kecil pada bagian pekerja yang masuk dalam pekerjaan informal yang terlihat. Ketidaksetaraan gender dalam pasar tenaga kerja juga terus ada.

Kemajuan dalam pendapatan memadai dan kerja produktif hanya sedikit. Walaupun kenaikan positif keseluruhan pada upah riil rata-rata bagi laki-laki dan perempuan, perbedaan antara upah minimum dan upah menengah mengecil, disertai kenaikan pada batas upah riil ketika dibandingkan dengan tren upah minimum. Pengawasan kebijakan upah minimum perlu diperkuat untuk melindungi pekerja, khususnya dalam masalah ketidaksesuaian dan penyelenggaraan.

Selama dekade terakhir, sebuah bagian yang penting dan meningkat dari penduduk pekerja bergerak di pekerjaan musiman (dari 6 juta tahun 2001 menjadi 11,5 juta tahun 2012). Bagian dari pekerja pada pekerjaan informal menurun sedikit namun masih tinggi, sedikitnya tiga dari lima pekerja bekerja di sektor informal. Upah riil dari pekerja musiman masih kira-kira dua per lima dari tingkat pekerja reguler. Peningkatan jumlah dari pekerja yang menerima bayaran rendah (dua per tiga dari upah menengah) antara 1996 dan 2012 juga dalam tren mengkhawatirkan.

Usaha lebih jauh dibutuhkan untuk menanggapi pekerjaan berbahaya dan pekerja anak. Perkembangan penting dibuat antara 1996 dan 2010 dengan meningkatkan penerimaan sekolah dan tingkat kehadiran, dan jumlah dari pekerja anak pada penduduk usia 10 sampai 17 tahun menurun. Meskipun demikian, lebih dari 1,5 juta anak usia 10 sampai 17 terlibat sebagai pekerja anak tahun 2010, kebanyakan di sektor pertanian. Hampir setengah dari pekerja anak berusia 5-17 terlibat di pekerjaan berbahaya.

Dilihat sebagai kerja paksa, kemudian dilakukan usaha untuk menghapus perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Pengukuran lebih jauh dibutuhkan untuk menghapus secara total bentuk pekerjaan mengerikan ini namun usaha tersebut terhalang oleh kemiskinan, akses atas pendidikan sekunder dan tersier, permintaan pekerja anak, dan juga kesenjangan dalam pelaksanaan hukum.

Tingkat kemiskinan dan pengangguran banyak digunakan sebagai indikator kunci untuk mengukur perkembangan sosio-ekonomi secara global. Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) memasukkan sebuah target untuk mendapatkan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda. Tetapi, target ini hanya menyediakan pandangan terbatas terhadap *kualitas* pertumbuhan dan pembangunan. Demi memastikan perkembangan tersebut mampu mendukung prinsip keadilan sosial, perlu untuk memiliki pemahaman lebih luas dari kerugian dan kualitas dari pembangunan, khususnya kualitas dari mata pencaharian bagi mereka yang telah lolos dari kerugian.

Indikator yang bisa menyediakan pandangan lebih jauh untuk kualitas dari pekerjaan dan perkembangan makro-ekonomi termasuk pengangguran terselubung, formalitas, pekerjaan berbahaya, pendapatan rendah, dan perlindungan sosial. Pengangguran terselubung didefinisikan sebagai mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan mencari tambahan pekerjaan. Terdapat peningkatan pada tingkat pengangguran terselubung di Indonesia belakangan ini. Begitu juga dengan pekerjaan informal yang tertular, namun terdapat ketidaksetaraan regional besar pada perkembangan ekonomi formal. Proporsi dari pekerja pada pekerjaan rentan, di mana ini adalah sebuah ukuran bagi pekerja mandiri, musiman atau pekerja keluarga, tetap pada kisaran 65 persen dari semua jenis pekerja tersebut.

Indonesia dalam jalur untuk mendapatkan target tingkat pengangguran tahun 2014, namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Sebagian besar penduduk pekerja masih jauh dalam memiliki pekerjaan layak yang menyediakan perlindungan sosial, memenuhi standar minimum buruh dan keuntungan dari dialog sosial. Dalam menghadapi latar belakang ini, Indonesia tidak boleh hanya berkonsentrasi pada pengurangan pengangguran untuk mendukung perkembangan sosio-ekonomi yang adil. Fokus yang lebih jauh harus diberikan pada kualitas mata pencaharian dan pekerjaan pada mereka yang telah lolos dari ukuran terendah kerugian. Penekanan perlu diletakkan pada kualitas dari pekerjaan dibandingkan hanya semata-mata mengurangi tingkat pengangguran. Lebih dari itu, memperbesar cakupan dari indikator yang digunakan untuk mengukur pekerja dan pengangguran terselubung akan mendukung tujuan nasional dalam mencapai pekerjaan layak untuk semua.

Agar lebih dekat ke tujuan dari mencapai pekerjaan layak untuk semua, penekanan harus ditempatkan pada kualitas pekerjaan dibandingkan hanya ke pengurangan tingkat pengangguran

Kotak 1: “Rencana Aksi Ketenagakerjaan” dari Wakil Presiden

Pada Mei 2012 Kantor Sekretariat Wakil Presiden mempersembahkan Rencana Aksi untuk Menciptakan Lapangan Kerja untuk Indonesia yang berisi lima pilar strategis berikut ini:

1. Informasi pasar tenaga kerja dan layanan ketenagakerjaan;
2. Memperkuat keterampilan dan kapasitas tenaga kerja;
3. Mengembangkan usaha mikro dan kecil dan kewirausahaan untuk menciptakan kesempatan kerja;
4. Program infrastruktur insentif buruh; dan
5. Program penciptaan pekerjaan darurat.

Rencana Aksi Ketenagakerjaan disusun untuk meningkatkan hubungan dan standar antara kebijakan dan program pasar tenaga kerja dengan membuat investasi strategis pada sistem dan pelayanan untuk memperkuat hasil pekerjaan. Sebagai contoh, isu-isu yang diketahui berkaitan dengan keterlibatan sektor swasta terbatas dalam perkembangan dari program pelatihan dan berusaha meningkatkan hubungan dan standar minimum untuk meningkatkan fungsi dari program pelatihan berbasis kompetensi. Ini direncanakan untuk memperkuat kewirausahaan dengan mengonsolidasikan pelayanan pengembangan bisnis, meningkatkan akses atas modal dan secara lebih jauh melibatkan sektor swasta dalam perancangan program. Ini juga akan memperkuat hubungan strategis antara program penciptaan kerja yang diinvestasikan pada infrastruktur dan tujuan perkembangan ekonomi yang lebih luas. Tujuannya adalah bahwa usaha ini akan memperkuat kapasitas tenaga kerja dan hasil pekerjaan untuk pasar tenaga kerja, serta mendukung pertumbuhan dengan kesetaraan.

2.2 Perlindungan sosial demi kelangsungan ekonomi

Undang-Undang Dasar Indonesia menyadari hak atas keamanan sosial bagi semua

Undang-undang Indonesia mengakui hak perlindungan sosial untuk semua, dan tanggung jawab pemerintah dalam perkembangan sebuah kerangka kerja untuk ketetapan dari perlindungan sosial. Indonesia menganggap perlindungan sosial sebagai elemen penting dari stabilitas sosio-ekonomi dan pemerataan. Walaupun program perlindungan sosial saat ini cenderung terbagi, kemajuan terjadi menghadapi ketentuan dari perlindungan sosial yang lebih komprehensif. Sebuah tonggak penting yaitu pelaksanaan progresif dari Undang-Undang Sistem Perlindungan Sosial Nasional (Undang-Undang No. 40/2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional). Undang-undang memerintahkan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh rakyat mencakup kesehatan, kecelakaan kerja, masa tua, dan kematian serta pensiun bagi pekerja dan keluarganya. Undang-undang memuat ketentuan untuk skema non-kontribusi bagi rakyat miskin,

skema kontribusi bagi yang bekerja sendiri, dan skema perlindungan sosial menurut undang-undang bagi pekerja ekonomi formal. Legislasi penting lain yang berkaitan dengan perlindungan sosial adalah Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan diharapkan memulai operasinya tahun 2014, sementara penerapan dari BPJS Ketenagakerjaan diantisipasi mulai tahun 2015.

ILO dan Pemerintah Indonesia telah bekerja sama untuk mendukung realisasi dari perlindungan sosial bagi semua melalui kerangka kerja Landasan Perlindungan Sosial (SPF) ILO. Sejak April 2011 hingga November 2012 ILO, dengan kolaborasi erat dengan kementerian yang terkait dan sub kelompok kerja UNPDF untuk Landasan Perlindungan Sosial di Indonesia, Badan-badan PBB, mitra sosial, organisasi masyarakat sipil, akademis, dan pemangku kepentingan terkait untuk mengkaji situasi perlindungan sosial di Indonesia, mengidentifikasi kesenjangan kebijakan dan isu penerapan, dan menggambar rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mencapai landasan perlindungan sosial yang komprehensif di Indonesia.

Pengkajian menemukan beberapa kesenjangan umum dan isu seputar program perlindungan sosial di Indonesia, antara lain: keterbatasan jangkauan, akses terbatas untuk pelayanan sosial – khususnya di bagian Timur Indonesia, keterbatasan hubungan antara program perlindungan sosial dan layanan pekerjaan, hampir tidak ada perlindungan sosial untuk pekerja di ekonomi informal, penghindaran perlindungan sosial yang tinggi di ekonomi formal, keterbatasan data dan isu target, sebagaimana isu koordinasi dan tumpang tindih di antara macam-macam program pemerintah.

Pengkajian memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan sosial di Indonesia, yaitu:

- Merancang dan mengarahkan Pelayanan Satu Jendela (Single Window Service/SWS) untuk program perlindungan sosial dan layanan ketenagakerjaan di tingkat lokal;
- Memastikan bahwa paket pelayanan kesehatan meliputi tingkat jaminan yang memadai;
- Memperluas cakupan dari Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah program transfer tunai yang memfasilitasi akses untuk nutrisi, pendidikan, dan perawatan anak untuk keluarga miskin;
- Mendukung penerapan BPJS Kesehatan (BPJS I) dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS II);
- Menjalankan sebuah studi kelayakan untuk asuransi pengangguran dengan pekerjaan dan program keterampilan;
- Memperluas cakupan dari program untuk angkatan tua rentan dan masyarakat penyandang disabilitas berat; dan
- Mengembangkan sebuah basis data yang mendalam dari individu dalam kelompok sasaran seperti penyandang disabilitas.

Efektivitas dari program perlindungan sosial di Indonesia dipengaruhi oleh cakupan dan akses atas layanan, menghubungkan antara layanan perlindungan sosial dengan layanan pekerjaan, dan mekanisme untuk mengawasi kepatuhan

Kotak 2: Rekomendasi ILO No. 202 Tahun 2012 tentang Landasan Perlindungan Sosial

Konsep landasan perlindungan sosial diungkapkan di Rekomendasi ILO No. 202 tentang Landasan Perlindungan Sosial Nasional yang diadopsi sebagian besar pemerintah, perwakilan pengusaha dan pekerja yang menghadiri Konferensi Perburuhan Internasional pada Juni 2012. Rekomendasi menegaskan kembali perlindungan sosial sebagai hak asasi manusia dan sebuah kebutuhan sosial dan ekonomi. Rekomendasi menyediakan panduan untuk negara dalam membuat dan menjaga landasan perlindungan sosial nasional sebagai elemen dasar dari sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Sebagai tambahan, Rekomendasi menawarkan arahan untuk mengembangkan strategi untuk memastikan secara bertahap tingkat yang lebih tinggi dari perlindungan sosial tersedia untuk sebanyak mungkin orang seiring berjalannya waktu.

Landasan perlindungan sosial merupakan sebuah set dari definisi nasional jaminan perlindungan sosial pokok yang memungkinkan dan memperkuat seluruh anggota masyarakat untuk mengakses kebutuhan dan pelayanan minimum kapan saja. Landasan perlindungan sosial bermaksud untuk memperoleh situasi di mana:

- (1) Seluruh penduduk memiliki akses pelayanan kesehatan terjangkau, termasuk pelayanan persalinan;
- (2) Seluruh anak menerima jaminan tunjangan untuk memperoleh akses atas nutrisi, pendidikan, perawatan dan berbagai macam kebutuhan dan pelayanan;
- (3) Seluruh orang dalam usia kerja baik yang bekerja maupun tidak memperoleh pendapatan memadai, khususnya dalam kondisi sakit, pengangguran, persalinan dan disabilitas, menerima jaminan pendapatan pokok dan;
- (4) Seluruh penduduk pada usia tua menerima jaminan pendapatan pokok melalui pensiun atau bantuan tunai sejenis.

Komponen dari landasan perlindungan sosial bersifat fleksibel dan selayaknya diselaraskan dengan kerangka kerja perlindungan sosial pada tingkat nasional. Empat jaminan menerapkan standar minimum untuk memastikan tersedianya akses, cakupan dan tingkat pendapatan jaminan dan pelayanan kesehatan, dibandingkan merumuskan gambaran spesifik untuk sistem perlindungan sosial nasional. Meski tidak semua negara bisa dengan cepat meletakkan seluruh komponen dari landasan perlindungan sosial untuk seluruh warganya, landasan perlindungan sosial ini menyediakan sebuah kerangka kerja untuk merencanakan standar minimum dan implementasi bertahap dari sistem perlindungan sosial secara menyeluruh.

Kerangka kerja landasan perlindungan sosial bisa digunakan untuk menggambarkan perlindungan sosial yang sudah ada, perlindungan sosial dan program pengurangan kemiskinan, mengidentifikasi kesenjangan kebijakan dan masalah penerapannya, dan rekomendasi untuk formulasi kebijakan perlindungan sosial lebih lanjut dan implementasinya. Biaya skema perlindungan sosial yang ditawarkan bisa diperkirakan dan diproyeksikan dengan menggunakan model ekonomi sederhana, agar bisa memberikan masukan penting terkait ruang fiskal dan opsi kebijakan perlindungan sosial.

2.3 Memperkirakan biaya perluasan perlindungan sosial di Indonesia

Biaya program perluasan perlindungan sosial di wilayah yang dipilih dapat diperkirakan dan diproyeksikan dengan skenario pembangunan untuk masukan ke dalam model ekonomi sederhana – yang disebut Protokol Penilaian Cepat (RAP). Model RAP ini berdasarkan pada penggunaan data dan data *excel* dari sistem akun nasional untuk mengkalkulasikan biaya program perlindungan sosial yang dipilih bagi penduduk sasaran. Model ini tidak memberikan rekomendasi finansial dari keuntungan tambahan, namun memberitahukan bahwa perlindungan sosial dapat disubsidi penuh atau sebagian oleh pemerintah, atau mendapatkan kontribusi penuh.

Skenario dibuat dengan memfokuskan pada akses layanan kesehatan dan jaminan penghasilan untuk empat kelompok sasaran, yaitu:

- Anak-anak;
- Penduduk usia kerja;
- Orang-orang dengan disabilitas; dan
- Lanjut usia.

Model ini digunakan untuk memperkirakan ketentuan tambahan yang mungkin diperlukan untuk menawarkan perlindungan sosial dan jaminan penghasilan ke seluruh rakyat Indonesia di sepanjang siklus kehidupannya - untuk “*menghapus kesenjangan Landasan Perlindungan Sosial*”. Biaya yang diperkirakan adalah 2,45 persen dari PDB pada tahun 2020 untuk menjamin tingkat minimum dari perlindungan sosial bagi semua orang. Estimasi biaya ini merupakan penambahan pengeluaran perlindungan sosial yang sudah ada, yaitu 1,2 persen dari PDB di tahun 2009 dan tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain, misalnya Thailand (3,6 persen) atau Vietnam (4,7 persen).

Berkaitan dengan layanan kesehatan, penghapusan kesenjangan Landasan Perlindungan Sosial untuk layanan kesehatan menghabiskan biaya antara 0,17 persen dari PDB (skenario “rendah”) hingga 0,98 persen dari PDB (skenario “tinggi”) di tahun 2020. Kedua skenario rendah dan tinggi untuk penyediaan layanan kesehatan terkait dengan paket yang saat ini dikembangkan dalam pengimplementasian kerangka kerja BPJS Kesehatan (BPJS I). “Skenario rendah” termasuk:

- Perluasan manfaat asuransi kesehatan tingkat moderat kelas tiga bagi masyarakat miskin, hampir miskin, dan rentan (di bawah 40 persen berdasarkan penghasilan);
- Tes HIV bagi penduduk yang paling berisiko;
- Pemeriksaan rutin bagi Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA);
- Pengobatan Antiretrovirus (ARV) untuk orang-orang yang mengidapnya; dan
- Pengenalan paket universal untuk mengurangi penularan HIV dan sifilis dari ibu ke anak.

“Skenario tinggi” termasuk:

- Perluasan manfaat asuransi kesehatan tingkat tinggi kelas pertama bagi seluruh penduduk ekonomi informal;
- Penyertaan tes HIV bagi penduduk yang aktif secara seksual pada umumnya (usia 15-49);
- Pemeriksaan rutin untuk semua ODHA;
- Pengobatan ARV untuk orang-orang yang mengidapnya; dan
- Pengenalan paket universal untuk mengurangi penularan HIV dan sifilis dari ibu ke anak.

Terkait dengan keamanan jaminan penghasilan untuk anak-anak, penghapusan kesenjangan Landasan Perlindungan Sosial diperkirakan memakan biaya antara 0,03 persen dari PDB (skenario “rendah”) hingga 0,18 persen dari PDB (skenario “tinggi”) di tahun 2020. “Skenario rendah” termasuk perluasan program PKH untuk mencakup semua rumah tangga yang miskin. “Skenario tinggi” termasuk tunjangan anak-anak universal untuk semua anak-anak usia sekolah dasar. Tunjangan yang diusulkan ini sama dengan keuntungan PKH yang ada.

Penghapusan kesenjangan Landasan Perlindungan Sosial untuk penduduk usia kerja melalui penetapan program pekerjaan umum terkait dengan pelatihan kejuruan diperkirakan memakan biaya dengan rata-rata minimum 0,47 persen dari PDB di tahun 2020. Meskipun demikian, studi kelayakan yang lebih terinci dari skema asuransi pengangguran, infrastruktur publik, dan program pekerjaan umum harus dilakukan.

Sehubungan dengan jaminan penghasilan untuk usia lanjut dan orang dengan disabilitas berat, penutupan kesenjangan Landasan Perlindungan Sosial untuk usia lanjut dan orang dengan disabilitas berat diperkirakan memakan biaya antara 0,08 persen dari PDB (skenario “rendah”) hingga 0,82 persen dari PDB (skenario “tinggi”) di tahun 2020. “Skenario rendah” termasuk perluasan skema tunjangan pensiun tanpa kontribusi yang sudah ada ke semua orang dengan disabilitas berat dan semua usia lanjut yang rentan. “Skenario tinggi” termasuk perluasan skema tunjangan pensiun tanpa kontribusi yang ada untuk semua orang dengan disabilitas berat dan penetapan dari tunjangan pensiun universal untuk orang tua berusia 55 tahun (usia pensiun resmi dalam ekonomi formal) dan lebih.

Kotak 3:

Penyediaan layanan kesehatan untuk pekerja: Variasi dalam produktivitas dan efisiensi di tingkat perusahaan: Sebuah studi kasus dari industri pakaian di Jabodetabek⁵

Kebijakan dan undang-undang yang ada mengenai penyediaan layanan kesehatan dirancang untuk memastikan bahwa para pengusaha menyediakan asuransi layanan kesehatan bagi para pekerja walaupun pada tingkat minimum. Dalam ekonomi formal, perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 10 pekerja, atau memberikan upah sebesar Rp. 1 juta, diwajibkan untuk mendaftarkan pekerja beserta keluarganya (suami/istri hingga tiga anak di bawah usia 21 tahun) dalam skema perlindungan sosial Jamsostek atau mendapatkan persetujuan untuk menggunakan jasa penyedia pereliharaan kesehatan alternatif. Jamsostek memiliki cakupan yang luas dan memberikan keuntungan terbesar bagi para pekerja. Jamsostek juga merupakan penyedia paling mahal. Oleh karena itu, banyak perusahaan di Indonesia memilih untuk memenuhi persyaratan penyediaan layanan kesehatan melalui penyedia lain, khususnya karena terdapat sedikit bukti bahwa mengeluarkan lebih banyak uang untuk perlindungan sosial dan layanan kesehatan bagi para pekerja akan menguntungkan perusahaan secara langsung atau tidak langsung.

Better Work Indonesia⁶ melakukan sebuah studi untuk meneliti hubungan antara keuntungan sosial dan produktivitas. Data yang dikumpulkan dari 42 pabrik garmen di Jabodetabek antara bulan September 2011 dan Februari 2012 digunakan untuk menganalisis pertanyaan penelitian menggunakan analisis regresi linear.

Penemuan dasar ini menetapkan hubungan antara pengeluaran dari sebuah perusahaan pada keuntungan sosial untuk pekerjanya, termasuk asuransi kesehatan, dan tingkat produktivitas serta efisiensi perusahaan. Disarankan agar perusahaan mengeluarkan dana lebih besar bagi keuntungan sosial terutama untuk yang memiliki kesenjangan produksi yang rendah dan tingkat “*turn over*” rendah. Secara khusus ditemukan bahwa:

- Pabrik yang memiliki tingkat *turn over* dalam triwulan mengeluarkan uang lebih sedikit pada keuntungan untuk pekerjanya, dan kejadian yang sama terjadi untuk pabrik yang memiliki kesenjangan produksi yang lebih tinggi.
- Pabrik yang menggunakan Jamsostek dikaitkan dengan kesenjangan produksi rendah dan dengan *turn over* yang rendah

Penelitian lebih lanjut menggunakan kumpulan data panel yang diperlukan untuk meneliti hubungan alami antara ketentuan keuntungan, misalnya program layanan kesehatan dan produktivitas perusahaan.

5 Sarwar, I (2012) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pekerja: Variasi dalam Produktivitas dan Efisiensi di Tingkat Perusahaan – Sebuah Studi Kasus dari Industri Pakaian di DKI Jakarta, Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Jakarta (tidak diterbitkan).

6 Better Work Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kondisi bekerja dan produktivitas dalam sektor intensif pekerjaan yang ditargetkan dengan peningkatan pemenuhan dengan standar pokok ketenagakerjaan internasional dan perundang-undangan ketenagakerjaan Indonesia. Secara bersama-sama, proyek ini akan mempromosikan produktivitas dan daya saing dari perusahaan terkait dengan rantai pasokan global Indonesia. Better Work Indonesia didanai oleh AusAID sejak tanggal 1 Juli 2010 hingga 30 Juni 2015.

2.4 Dampak perekonomian dari program-program pekerjaan umum dan bantuan tunai di Indonesia

Indonesia memiliki sejumlah program perlindungan sosial yang mendukung pemberdayaan progresif keluarga miskin

Sistem perlindungan sosial yang ada di Indonesia terdiri atas berbagai skema perlindungan sosial, bantuan sosial, dan subsidi pemerintah. Program-program ini termasuk juga mensubsidi makanan dan pupuk, ketentuan perlindungan sosial dan asuransi kesehatan, bantuan tunai bersyarat dan tidak bersyarat, program pekerjaan umum dan pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan keuangan mikro. Program-program perlindungan sosial di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu:

- Kelompok 1: Bantuan sosial rumah tangga;
- Kelompok 2: Pemberdayaan masyarakat; dan
- Kelompok 3: Pengembangan usaha mikro dan kecil.

Kelompok 1, bantuan sosial rumah tangga, dibuat untuk mendukung rumah tangga yang sangat miskin melalui intervensi yang ditargetkan dan universal. Program ini termasuk jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin (Jamkesmas), beras untuk masyarakat miskin (Raskin), bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan/PKH), beasiswa untuk masyarakat miskin, dan bantuan sosial untuk para disabilitas, usia lanjut, dan anak-anak terlantar. Kelompok 2, pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan penghasilan keluarga miskin, dengan mengikutsertakan masyarakat miskin dalam proses pembangunan. Program dalam kelompok 2 termasuk di antaranya PNPM Mandiri, Padat Karya, dan Jalan Pertanian, dan sebagainya. Kelompok 3, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil dan program unggulannya dikenal sebagai KUR (kredit mikro).

Ketiga kelompok yang diikutsertakan dirancang untuk mendukung pemberdayaan progresif keluarga miskin, dengan gagasan yang menguntungkan untuk meningkatkan dari bantuan sosial ke pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha, dan yang kemudian dapat mengurangi kemiskinan dalam tindakan yang berkelanjutan. Namun, keseluruhan efektivitas dan kesuksesan program ini yang mendukung keluarga miskin untuk keluar dari kemiskinan masih ditetapkan.

Dampak luas perekonomian dari program perlindungan sosial dapat diperkirakan menggunakan model perekonomian

Efek perekonomian luas dari program ini masih tidak jelas. Misalnya, pemberian bantuan langsung tunai ke keluarga miskin memicu pengeluaran rumah tangga, dan pemberian upah melalui program pekerjaan umum memicu sektor pembangunan dan penghasilan keluarga miskin. Tingkatan dari setiap program memicu perekonomian dan menciptakan pekerjaan untuk kelompok sasaran masih belum diketahui. Program pekerjaan umum ini memerlukan keuntungan tertentu, tetapi efektivitas penyasaran mereka sama sekali tidak mudah dipahami. Sama halnya, bantuan langsung tunai dapat secara efektif menjangkau keluarga miskin, namun implikasi dari stimulasi ekonomi saat ini tidak diketahui.

Peran bantuan tunai dan program pekerjaan umum dalam perekonomian Indonesia dapat dengan lebih mudah dipahami melalui aplikasi perangkat yang dikenal sebagai ‘Matriks Akuntansi Sosial Dinamis’. Istilah ‘Matriks Akuntansi Sosial Dinamis’ (DySAM) menggambarkan sebuah instrumen yang berbasis pada Matriks Akuntansi Sosial ‘statis’ yang ada untuk setiap kegiatan ekonomi dan rangkaian waktu pemutakhiran yang tersedia dari akun nasional (SNA), yang memberikan dasar untuk memperkirakan SAM di masa mendatang. DySAM yang dibuat di Indonesia termasuk di dalamnya akun satelit pekerja yang sangat rinci serta informasi pilihan teknologi di sektor pembangunan. Hal ini menjadi perangkat yang berguna untuk memeriksa efektivitas dari program perlindungan sosial.

Dalam rangka penelitian program perlindungan sosial dengan DySAM, perlu dilakukan simulasi. Berkaitan dengan program bantuan tunai, Pemerintah merencanakan untuk meningkatkan program bantuan tunai (PKH) agar dapat menjangkau tiga juta keluarga pada tahun 2014. Saat ini program PKH sudah menjangkau satu juta keluarga dan menelan biaya sekitar Rp. 1,6 triliun pertahun. Rata-rata pemberian bantuan tunai per keluarga adalah Rp. 1.300.000 per tahun dan perluasan program ini akan memerlukan biaya administratif tambahan. Oleh karena itu diperkirakan untuk menjangkau tiga juta keluarga, PKH juga memerlukan suntikan dana tambahan sebesar Rp. 2,9 triliun per tahun. Selain itu, sudah diketahui bahwa rata-rata dua per tiga dari keuntungan program ini diberikan untuk wilayah pedesaan di sektor pertanian dan target program ini adalah keluarga sangat miskin di Indonesia. Berdasarkan informasi ini, pemetaan skenario untuk simulasi dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 7:
Pemetaan skenario untuk simulasi bantuan tunai

Klasifikasi Keluarga	Perolehan PKH	Estimasi biaya (milyar rupiah)
Buruh Pertanian Pedesaan	33%	957
Pemilik Perkebunan Pertanian Pedesaan (<0,5 Ha)	33%	957
Petani Menengah Pertanian Pedesaan (0,5-1 Ha)	0	0
Petani Besar Pertanian Pedesaan (>1 Ha)	0	0
Penghasilan Rendah Non Pertanian Pedesaan	17%	493
Bukan Angkatan Kerja Pedesaan (NILF)	0	0
Penghasilan Menengah ke Atas Non Pertanian Pedesaan	0	0
Penghasilan Rendah Perkotaan	17%	493
Bukan Angkatan Kerja Perkotaan (NILF)	0	0
Penghasilan Menengah ke Atas Perkotaan	0	0
Perusahaan	0	0
Total	100%	2900

Sumber: ILO (2012)

Untuk mengetahui dampak pekerjaan dan perekonomian dari investasi pekerjaan umum intensif pekerja dan untuk membandingkan dampak program ini dengan program bantuan tunai Indonesia, skenario kedua juga menyuntikan dana sebesar Rp. 2.900 miliar ke sektor pembangunan dalam akun komoditas seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 8:
Pemetaan skenario untuk simulasi pekerjaan umum

Sektor komoditas DySAM	Pekerjaan umum	Suntikan dana (miliar rupiah)
Jalan Intensif Pekerja	60%	1740
Jalan Intensif Modal	0	0
Irigasi	0	0
Pembangunan Lainnya	40%	1160
Total	100%	2900

Sumber: ILO (2012)

Simulasi ini menunjukkan bahwa peningkatan kedua program bantuan tunai dan pekerjaan umum dapat menguntungkan untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan

Secara umum, hasil dari simulasi ini menunjukkan bahwa peningkatan program bantuan tunai (Skenario 1) dan peningkatan program pekerjaan umum (Skenario 2) akan memberikan dampak positif dalam perekonomian. Namun, diharapkan bahwa program pekerjaan umum akan memberikan dampak besar dalam keluaran sektoral dibandingkan dengan program bantuan tunai. Program pekerjaan umum akan meningkatkan total keluaran sektoral dengan rata-rata Rp. 8,2 triliun atau rata-rata 0,075 persen, sementara program bantuan tunai akan meningkatkan keluaran sektoral dengan rata-rata Rp. 5,3 triliun atau 0,049 persen.

Analisis lanjutan dari hasil dalam sektor perekonomian menunjukkan bahwa sektor manufaktur diharapkan mendapatkan dampak positif yang signifikan dalam kedua skenario tersebut. Namun, peningkatan program pekerjaan umum akan memberikan dampak besar dalam sektor manufaktur dibandingkan dengan peningkatan program bantuan tunai. Program pekerjaan umum akan meningkatkan keluaran sektor manufaktur dengan rata-rata Rp. 2,2 triliun, yang tentu saja lebih besar dari dampak program bantuan langsung yang memproyeksikan peningkatan keluaran Rp. 2,1 triliun. Hal ini terjadi karena sektor pembangunan memiliki hubungan yang kuat dengan sektor manufaktur dalam penyediaan kebutuhan (misalnya, penyediaan semen dan besi).

Program bantuan tunai lebih efektif menjangkau keluarga miskin dibandingkan program pekerjaan umum

Skenario bantuan tunai memberikan bantuan dana langsung tunai kepada keluarga miskin. Keluarga miskin ini biasanya menggunakan penghasilan tambahan untuk membeli kebutuhan atau mengirimkan kepada keluarganya. Hal ini akan menstimulasi kegiatan perekonomian dan membuat lebih banyak permintaan dalam sektor hulu dan hilir. Persentase terbesar dari pengeluaran keluarga dengan penghasilan rendah ada dalam

sektor makanan, minuman, dan tembakau, yang juga menjadi bagian dari sektor manufaktur. Sektor makanan, minuman, dan tembakau jika dilihat ke belakang memiliki hubungan kuat dengan sektor pertanian. Oleh karena itu, permintaan tinggi dalam sektor makanan, minuman, dan tembakau – sebagai hasil dari bantuan uang kepada keluarga dengan penghasilan rendah di bawah program bantuan tunai – juga akan menciptakan lebih banyak permintaan dalam sektor pertanian.

Terkait dengan penghasilan keluarga, program bantuan langsung tunai juga memiliki dampak besar dibandingkan pekerjaan umum. Hasil simulasi menyarankan bahwa program bantuan tunai akan meningkatkan penghasilan rumah tangga sebesar 0,11 persen, dan program pekerjaan umum akan meningkatkan penghasilan rumah tangga sebesar 0,07 persen. Program pekerjaan umum memiliki lebih banyak pendistribusian dampak ke semua kelompok rumah tangga, yang menunjukkan bahwa intervensi tidak secara eksplisit menargetkan pada keluarga miskin. Program bantuan tunai dapat mencapai dampak yang ditargetkan yang relatif lebih menguntungkan bagi keluarga dengan penghasilan rendah.

Terkait dengan pekerja, program pekerjaan umum juga memiliki dampak besar dibandingkan program bantuan tunai. Hasil simulasi menyarankan bahwa peningkatan program bantuan tunai akan menciptakan sekitar 80.000 pekerjaan baru, sementara peningkatan program pekerjaan umum akan menciptakan sekitar 103.000 pekerjaan baru. Hal ini berarti bahwa setiap dollar dari program pekerjaan umum akan menciptakan 30 persen pekerjaan lebih banyak dibandingkan program bantuan tunai.

Sektor yang diprediksi akan menguntungkan pekerja dalam peningkatan program bantuan sosial adalah sektor pertanian, perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor konstruksi. Diperkirakan bahwa program bantuan tunai akan menciptakan lebih dari setengah dari pekerjaan baru di sektor pertanian dan rata-rata 15 persen dari pekerjaan baru di sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Program pekerjaan umum akan menciptakan sekitar setengah dari pekerjaan baru di sektor konstruksi, dengan jumlah pekerjaan yang ada lebih banyak ditemukan dalam sektor pertanian dan perdagangan, serta dalam sektor hotel dan restoran.

Program pekerjaan umum akan menciptakan lebih banyak pekerjaan baru untuk kaum muda dibandingkan dengan program bantuan tunai. Sebagian besar dari kesempatan pekerjaan baru akan ditujukan untuk buruh tanpa keterampilan dalam kedua simulasi ini. Berkaitan dengan gender, pekerjaan baru ini sebagian besar tersedia untuk pekerja laki-laki. Diperkirakan bahwa lebih dari 62 persen pekerjaan baru dari kedua simulasi ini ditujukan untuk laki-laki.

Kesimpulannya, ada beberapa penemuan penting yang dapat kami gambarkan dari analisis ini:

Program pekerjaan umum lebih efektif menciptakan pekerjaan baru dibandingkan program bantuan tunai

- Pertama, program pekerjaan umum terlihat memiliki dampak yang lebih luas dalam keluaran sektoral dibandingkan dengan program bantuan tunai.
- Kedua, program bantuan tunai diharapkan dapat lebih efisien dalam meningkatkan penghasilan rumah tangga keluarga miskin dibandingkan dengan program pekerjaan umum. Lebih lanjut, inisiatif ini juga akan mengurangi kesenjangan penghasilan antara keluarga berpenghasilan rendah dan tinggi.
- Ketiga, program bantuan tunai akan menciptakan lebih banyak pekerjaan untuk pekerja tanpa keterampilan, pekerja informal, dan pekerja musiman pertanian pada umumnya; dan
- Keempat, program pekerjaan umum akan menciptakan lebih banyak pekerjaan dibandingkan program bantuan tunai.

2.5 Revitalisasi Program Padat Karya

Rencana Aksi Ketenagakerjaan Wakil Presiden mencakup fokus tertentu dalam program Padat Karya Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Pilar 2), program pekerjaan umum memperpanjang kesempatan kerja jangka pendek para pengangguran, pekerja paruh waktu, dan pekerja rentan dalam perekonomian informal melalui investasi infrastruktur di tingkat pedesaan. Padat Karya atau “intensif pekerja” adalah konsep program yang telah diimplementasikan di berbagai keputusan kementerian sejak tahun 1960, dengan tujuan umum menyediakan bantuan upah bagi keluarga yang rentan, khususnya di masa krisis.

Program Padat Karya yang ada, yang diimplementasikan oleh Kementerian Transmigrasi dan Tenaga kerja, mencakup dua program, yaitu:

- Infrastruktur Padat Karya: membangun jalanan di pedesaan dan infrastruktur irigasi tersier; dan
- Produktif Padat Karya: membangun infrastruktur perekonomian, misalnya kandang kambing, kolam ikan, bangunan sederhana untuk pengoperasian usaha kecil dan menengah di tingkat desa.

Investasi infrastruktur menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat

Hal ini dimaksudkan bahwa investasi tersebut akan menghasilkan dampak berlipat ganda yang akan berdampak pada pembangunan perekonomian lokal dan penciptakan serta pengembangan kesempatan kerja baru untuk masyarakat setelah investasi awalnya.

Pada tahun 2012, Program Padat Karya menyediakan 360 infrastruktur dan 834 proyek produktif untuk pedesaan dengan rata-rata alokasi dana sebesar Rp. 136 juta untuk paket infrastruktur dan Rp. 150 juta untuk proyek produktif. Pada tahun 2013, Padat Karya menyediakan 1.025 proyek

infrastruktur dan 296 proyek produktif. Anggaran rata-rata per paket naik dari Rp. 136 juta menjadi Rp. 252 juta untuk perizinan pemakaian peralatan yang dapat meningkatkan kualitas investasi infrastruktur. Pada tahun 2012 kedua komponen program diperkirakan bernilai Rp. 202 miliar dan pada tahun 2013 naik menjadi Rp. 372 miliar.

Pada tahun 2011 selama persiapan Pengarahan Kebijakan Negara G20 dalam pertemuan Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan di Paris pada tanggal 26-27 September, Kementerian meminta ILO untuk mendukung mereka dalam melaksanakan peninjauan Program Padat Karya. Tujuan studi ini adalah meninjau kinerja yang sudah ada dari program tersebut yang terkait dengan strategi, tujuan, dan ketentuan implementasi, serta memberikan rekomendasi strategis yang dapat digunakan untuk memperkuat dampak yang ada di masa mendatang. Kemudian ILO diminta untuk mendukung pengembangan “Rancangan Utama” program Padat Karya yang baru. Selama tahun 2012 ILO telah mengumpulkan data dari delapan kabupaten di Indonesia dengan fokus yang spesifik untuk meninjau perencanaan, penerapan, dan tahap pasca penerapan program.

Secara umum, telah ditemukan perbedaan yang mendasar dalam penerapan program. Salah satu tantangan utama dari Padat Karya adalah kerjasama program ini dengan keputusan kementerian teknis lainnya, demikian juga pengembangan dari jalinan hubungan dan koordinasi dengan pasar tenaga kerja/program pengentasan kemiskinan lainnya. Peningkatan dalam pengontrolan kualitas untuk kedua standar perlindungan sosial dan infrastruktur dapat membantu mengoptimalkan dampak jangka panjang dan pendek program ini, meskipun tanpa perubahan atau pendekatan teknologi. Oleh karena itu, investasi pada pelatihan teknis dan administrasi proyek diperlukan untuk memperkuat hasil akhir program ini. Beberapa investasi juga akan membantu memperkuat transparansi program.

Penguatan kapasitas akan meningkatkan transparansi program

Lebih spesifik lagi, telah diketahui bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki akses yang terbatas dalam penerapan teknis, peralatan, dan basis data untuk mendukung mereka dalam perencanaan. Kapasitas sumber daya manusia harus diperkuat (baik secara kuantitas atau kualitas) guna mendukung peninjauan sistematis dari proposal dan laporan yang diterima setiap tahun, khususnya jika mencakup tujuan peningkatan kualitas teknis dari pekerjaan infrastruktur yang ada.

Di tingkat lokal, diketahui bahwa program ini terintegrasi penuh dengan proses musrenbang, tetapi karena keterbatasan jumlah dana yang tersedia untuk Padat Karya setiap tahunnya, partisipasi pemerintah dan masyarakat desa dalam pembuatan proposal masih sangat rendah, khususnya jika dibandingkan dengan program lain, seperti PNPM Mandiri.

Program ini sering dipertimbangkan oleh banyak desa untuk menjadi program infrastruktur masyarakat, dibandingkan menjadi program pengentasan kemiskinan. Penargetan masyarakat sasaran yang dipimpin

oleh pemerintahan desa digunakan untuk mengidentifikasi manfaat proyek, mengingat Padat Karya secara luas tidak ditujukan sebagai program pengentasan kemiskinan, penyertaan kelompok rentan dalam kesempatan kerja dapat ditingkatkan.

Program ini menetapkan standar nasional untuk upah harian selama delapan jam sehari, dengan remunerasi Rp. 40.000. Namun, di tingkat lokal upah harian ini sangat rendah, dan diketahui bahwa sangat sulit menemukan buruh (khususnya kaum muda) dengan remunerasi seperti ini. Untuk menanggulangi masalah ini, banyak lokasi percontohan menerapkan beberapa pendekatan tingkat tugas, dan bukan upah harian untuk mengimbangi pekerja. Di beberapa lokasi, pekerja memilih untuk tidak mempedulikan upah dan menggunakan alokasi dana untuk membeli tambahan aset yang mereka pilih. Kendati anggota masyarakat mungkin menyetujui keputusan ini, namun sangat penting diketahui tren ini tidak berhasil di kelompok rentan yang memiliki akses terbatas pada manfaat upah dan pengentasan kemiskinan dari proyek ini.

Pengembangan rencana strategis merupakan hal penting dalam pengimplementasian program yang efektif

Kajian nasional diperlukan untuk memberikan inventaris dari kapasitas Kementerian yang sudah ada dalam pengimplementasian Padat Karya dan pengembangan rencana strategis terkait kapasitas pembangunan agar secara efektif menerapkan program ini. Kemampuan untuk merencanakan, mengawasi, melaporkan, dan mengevaluasi harus diperkuat atau dibiayai dan diterapkan dalam sektor swasta guna meningkatkan keseluruhan dampak program ini.

Kapasitas Kementerian untuk melaksanakan sosialisasi dan penargetan proyek ini harus ditingkatkan untuk mencegah tindakan korupsi dan meningkatkan pengimplementasian program sebagai program pengentasan kemiskinan. Sementara itu, pelatihan teknis sebelumnya telah diberikan bagi staf lapangan, dan menjadi basis ad hoc. Misalnya, 45 hari pelatihan yang menjadi pelatihan dasar diberikan satu kali melalui Pusat Pengembangan Pelatihan Kejuruan Nasional di Bandung. Namun, pelatihan selanjutnya dan kursus penyegaran tidak dilaksanakan karena keterbatasan biaya. Di tingkat lokal, kantor-kantor pemerintahan mengimbangi hal ini dengan membangun kerjasama yang kuat dengan petugas Pekerjaan Umum. Program ini setidaknya dapat membantu akses yang lebih besar terhadap layanan teknis dan dapat memperkuat kapasitas kementerian untuk menerapkan elemen pemuatan program dari pendekatan berbasis sumber daya lokal (LRB) ILO dan guna mencapai kualitas dan hasil yang efektif.

ILO telah merekomendasikan bahwa kajian teknis harus dilakukan, dan bahwa peninjauan kapasitas sumber daya manusia dilakukan untuk mengembangkan rencana strategis dalam penguatan pengimplementasian program di masa mendatang. Direkomendasikan bahwa sinergi antara program Padat Karya dengan program pasar tenaga kerja serta pengentasan kemiskinan dapat diidentifikasi untuk memperkuat keseluruhan efektifitas pengeluaran pemerintah. Untuk meningkatkan efisiensi kontribusi program

dalam pengentasan kemiskinan, dipertimbangkan untuk mengikutsertakan kelompok yang tertinggal dan rentan, serta menggunakan perangkat perencanaan guna memastikan daerah tertinggal ini menjadi sasaran program.

Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang diciptakan melalui program Padat Karya, Kementerian merencanakan untuk secara berkala memperkenalkan pendekatan “Berbasis Sumber Daya Lokal” (LRB) ILO. Bantuan teknis diperlukan untuk memastikan keberhasilan pengenalan pendekatan ini. Juga direkomendasikan bahwa pengelolaan aset menjadi bagian terpadu dari kerjasama ini, dengan memastikan adanya penilaian kapasitas masyarakat untuk melakukan pengelolaan aset, menyediakan pelatihan pengelolaan aset dan memastikan bahwa masyarakat akan melakukan pengelolaan aset setelah investasi Padat Karya terpenuhi. Hal ini akan memastikan bahwa investasi infrastuktur membantu mendorong perekonomian lokal dalam jangka waktu panjang dan juga menciptakan kesempatan pekerjaan jangka pendek tambahan bagi penduduk desa dalam pengelolaan aset.

Untuk mengoptimalkan pekerjaan dan dampak pengentasan kemiskinan dari program Padat Karya, analisis ekonomi juga menjadi hal yang hakiki, termasuk pertimbangan biaya tambahan bagi bantuan teknis penting dan jaminan kualitas, pembelian materi berkualitas, dan penggunaan perangkat yang sesuai diperlukan untuk mencapai hasil kualitas teknis minimum dalam pekerjaan infrastruktur. Analisis ini juga harus menilai dampak peningkatan tingkat upah minimal dan dampak pekerjaan secara keseluruhan yang mengubah pilihan teknologi dan metodologi yang lebih menguntungkan untuk digunakan dalam program ini.

Disarankan bahwa pengelolaan aset menjadi bagian integral dari Program Padat Karya.

Kotak 4: Basis data terpadu untuk mempercepat pengentasan kemiskinan

Basis data terpadu untuk mendukung penargetan program perlindungan sosial dikembangkan oleh Kantor Wakil Presiden. Basis data elektronik ini berisikan informasi sosial, ekonomi, dan variabel demografis untuk 24,5 juta keluarga atau 96 juta orang dengan status kesejahteraan rendah di Indonesia. Basis data terpadu ini dirancang untuk mendukung proses perencanaan agar dapat meningkatkan penggunaan anggaran dan efisiensi penargetan program perlindungan sosial. Kantor pemerintahan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten yang turut serta dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dapat menggunakan data dari basis data terpadu yang dikelola oleh Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk meningkatkan efektivitas program dan proyek mereka.

2.6 Pekerjaan hijau untuk ekonomi hijau

Pada Juni 2011, dalam Konferensi Perburuhan Internasional Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa “Indonesia berkeinginan untuk meningkatkan strategi pengembangan keterampilan hijau nasional, berencana untuk melanjutkan program pemagangan kaum muda yang terdesentralisasi untuk pekerjaan hijau (ramah lingkungan) dan mengambil langkah untuk mendorong kewirausahaan dan usaha mandiri di sektor hijau.” Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste bekerja sama dengan Kantor Regional Asia dan Pasifik mendukung pelaksanaan visi ini melalui proyek yang berjudul “*Green Jobs* di Asia”. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan akses ke sumber data dan informasi yang dapat diandalkan dalam pekerjaan ramah lingkungan dan kemudian melakukan studi untuk mengidentifikasi dan memperkirakan *green jobs* di setiap sektor perekonomian di Indonesia. Studi tersebut menjelaskan hubungan antara lingkungan, ekonomi, dengan pekerjaan dan memberikan informasi dasar mengenai *green jobs* di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang dapat mendukung kemajuan negara ini dalam perekonomian ramah lingkungan yang kaya dengan pekerjaan.

Green jobs didefinisikan sebagai pekerjaan langsung yang diciptakan dalam berbagai sektor ekonomi untuk mengurangi dampak lingkungan dari sektor tersebut

ILO dan UNEP bersama-sama mendefinisikan *green jobs* sebagai pekerjaan langsung yang diciptakan dalam berbagai sektor perekonomian dan melalui aktivitas terkait yang mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan dan sektor tersebut, dan pada akhirnya membawa hal ini ke tingkat yang berkelanjutan. Pemahaman pekerjaan ramah lingkungan di tingkat nasional mencakup proses rinci dari tren teruji yang mempromosikan pembangunan ramah lingkungan dan mengaitkan informasi dengan standar metodologi untuk pengestimasi pekerjaan di negara tersebut. Penentuan kriteria definisi “hijau” dan “pekerjaan layak” harus bekerja sama dengan pemerintah, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja, demikian juga dengan pemangku kepentingan lain termasuk lembaga nasional khusus, kelompok masyarakat sipil dan akademis. Metodologi perkiraan pekerjaan ramah lingkungan di Indonesia dapat digambarkan sebagai proses “memperbesar” perekonomian makro menjadi perekonomian ramah lingkungan, untuk menopang pekerjaan dan juga pekerjaan ramah lingkungan (lihat gambar berikut).

Gambar 12:
Kerangka kerja untuk mengidentifikasi *green jobs*



Sumber: Kantor Regional ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste

Langkah pertama dalam metodologi untuk pengestimasian *green jobs* mencakup pemahaman struktur ekonomi dan kaitannya dengan pekerjaan sesuai dengan klasifikasi standar industri internasional. Setiap sektor ekonomi diuji untuk mendapatkan sub sektor tertentu yang dapat terintegrasi kuat dengan lingkungan. Di Indonesia terdapat sembilan sektor inti terkait dengan lingkungan yang merupakan *green jobs*, yaitu: pertanian, kehutanan, perikanan, penambangan dan energi, manufaktur, pembangunan, transportasi, pariwisata dan limbah.

Sub sektor ramah lingkungan yang ada bersama sektor utama telah ditetapkan melalui kombinasi diskusi kelompok terfokus dengan poin fokus utama dari setiap sektor, selain juga melalui tinjauan literatur peraturan dan perundangan nasional, standar sukarela atau nasional, dan kegiatan yang terasosiasi dengan setiap sektor. Hal ini menjadi tugas yang menantang, karena diperlukan pemahaman sektor ekonomi secara mendalam dan sering terkait dengan tren penelitian yang tidak terdokumentasi atau terakses dalam domain publik.

Ketika sub sektor ramah lingkungan diidentifikasi dan diketahui lebih lanjut, survei tenaga kerja digunakan untuk menghasilkan perkiraan pekerjaan yang dapat dipertimbangkan sebagai ramah lingkungan dalam setiap sub sektor ramah lingkungan. Metode ini digunakan untuk mengestimasi *green jobs* di Indonesia menggunakan data standar yang ditetapkan dan konsisten dengan metode yang berlaku untuk pengestimasian pekerjaan.

Selanjutnya, kriteria “pekerjaan layak” diperkenalkan untuk memberikan pemahaman mengenai kualitas pekerjaan. Fokus diskusi kelompok dengan konstituen ILO menetapkan bahwa variabel tersebut mencakup aspek mengenai penghasilan yang memadai, formalitas kerja, lingkungan kerja yang aman, akses perlindungan sosial, dialog sosial, dan keterwakilan pengusaha dan pekerja sangat relevan untuk memperkirakan kelayakan kerja di setiap sub sektor yang dipilih. Perkiraan *green jobs* diperoleh menggunakan kombinasi wawasan yang dikumpulkan dari fokus diskusi kelompok dan data dari survei angkatan kerja.

Secara agregat, studi ini menemukan bahwa pada tahun 2008 Indonesia sudah memiliki pekerjaan sekitar 8,7 juta (8,5 persen dari pekerjaan di semua sektor) yang dapat dipertimbangkan sebagai “ramah lingkungan”, dan di antaranya 3,9 juta pekerjaan atau 3,8 persen dari semua pekerjaan dipertimbangkan sebagai “*green jobs*” (ramah lingkungan dan sosial). Sebagian besar *green jobs* terdapat di pertanian, yang kemudian diikuti oleh transportasi dan manufaktur (lihat tabel di bawah).

Pada tahun 2008 sekitar 8,5 persen dari seluruh pekerjaan dapat dipertimbangkan sebagai “ramah lingkungan” dan 3,8 persen dipertimbangkan sebagai “green jobs”

Tabel 9:
Estimasi *Green jobs* di Indonesia, 2008

Sektor ekonomi	Pekerjaan ramah lingkungan	<i>Green jobs</i>
Pertanian	4.809.000	2.434.000
Kehutanan	214.000	97.000
Perikanan	550.000	242.000
Penambangan dan energi	7.000	5.000
Manufaktur	1.063.000	331.000
Pembangunan	415.000	187.000
Transportasi	1.659.000	603.000
Pariwisata	21.000	11.000
Total	8.738.000	3.911.000

Sumber: ILO (2013) *Green jobs*— sebuah konsep utama pembangunan dengan pemerataan yang berkelanjutan: Identifikasi dan estimasi pekerjaan hijau di Indonesia, Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste: Jakarta

Di sektor pertanian, studi ini mengidentifikasi tujuh sub sektor hijau, yaitu: Pertanian padi berdampak rendah, penanaman bibit berdampak rendah, pekebunan karet, minyak sawit yang ramah lingkungan, tanaman organik untuk minuman, peternak unggas berdampak rendah, dan pertanian campur. Jumlah keseluruhan pekerjaan ramah lingkungan di sektor pertanian diperkirakan sekitar 4,8 juta (12,3 persen dari seluruh pekerjaan di dalam sektor ini) dan jumlah keseluruhan *green jobs* diperkirakan sekitar 2,4 juta pekerjaan (6,24 persen dari pekerjaan di dalam sektor ini). Untuk meningkatkan jumlah *green jobs* di sektor pertanian di Indonesia, sangat penting untuk mendukung pengembangan lebih lanjut teknik pertanian organik dan berdampak rendah dalam penanaman padi, bibit lainnya, tanaman minuman, dan juga meningkatkan akses pelabelan sertifikasi organik bagi para petani. Untuk mempromosikan *green jobs* dalam peternakan unggas berdampak rendah dan pertanian terpadu, dan juga berbagai kegiatan pertanian lainnya, sangat penting untuk fokus pada peningkatan kondisi pekerjaan dan pengembangan rantai nilai yang bertujuan meningkatkan penghasilan, produktivitas dan akses terhadap pasar nasional dan lainnya.

Untuk meningkatkan green jobs di sektor kehutanan di Indonesia sangat penting untuk mempromosikan konsesi hutan alami yang berkelanjutan

Di sektor kehutanan, studi ini mengidentifikasi lima sub sektor hijau: hutan produksi alami berdasarkan undang-undang manajemen kehutanan berkelanjutan (SFM), konsesi hutan alami berkelanjutan, pengumpulan, pemanenan, dan penanaman rotan, produk hutan bukan kayu, dan pelayanan, perlindungan dan konservasi hutan. Jumlah keseluruhan pekerjaan ramah lingkungan di sektor kehutanan diperkirakan sekitar 214.000 (38,6 persen dari seluruh pekerjaan di dalam sektor ini) dan jumlah keseluruhan *green jobs* diperkirakan sekitar 97.000 (17,6 persen dari pekerjaan di dalam sektor ini). Banyak sub sektor hijau yang diidentifikasi dalam sektor kehutanan,

khususnya dalam produksi hutan bukan kayu, yang melibatkan kegiatan berbasis masyarakat dan menawarkan remunerasi dengan tingkat yang lebih rendah. Untuk meningkatkan kualitas pekerjaan di bidang ini, sangat penting untuk mendukung pembangunan rantai nilai dalam meningkatkan saham produsen dari harga batas. Secara umum, untuk meningkatkan jumlah *green jobs* di sektor kehutanan di Indonesia, sangat penting untuk mempromosikan konsesi hutan alami berkelanjutan melalui sertifikasi dan inspeksi yang terkait dengan Badan Pelabelan Ramah Lingkungan dan Kementerian Kehutanan.

Di sektor perikanan, studi ini mengidentifikasi tiga sub-sektor hijau, yaitu: penangkapan ikan ramah lingkungan dalam ekonomi formal untuk ekspor, pembudidayaan rumput laut, praktik baik di budidaya perairan. Jumlah keseluruhan pekerjaan ramah lingkungan di sektor perikanan diperkirakan sekitar 550.000 (41 persen dari seluruh pekerjaan di dalam sektor ini) dan jumlah keseluruhan *green jobs* diperkirakan sekitar 242.000 (18,1 persen dari pekerjaan di dalam sektor ini). Untuk meningkatkan jumlah pekerjaan hijau di sektor perikanan di Indonesia, sangat penting untuk mendukung pengimplementasian peraturan sektor perikanan untuk memastikan kuota penangkapan ikan dan perjanjian internasional mengenai penangkapan ikan dan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Di sektor budidaya perairan sangat penting untuk memastikan bahwa habitat pesisir yang berharga, misalnya hutan bakau, tidak hilang oleh pelanggaran penangkapan ikan atau ekspansi dari urbanisasi. Sangat penting untuk memastikan bahwa Konvensi Pekerja Maritim telah disahkan sehingga pengusaha dan pekerja dapat dalam hubungan industri yang formal.

Di sektor penambangan dan energi, studi ini mengidentifikasi tiga sub-sektor hijau, yaitu: energi geotermal, energi yang dapat diperbarui, dan biomassa. Jumlah keseluruhan pekerjaan ramah lingkungan di sektor penambangan dan energi diperkirakan sekitar 7.000 dan jumlah keseluruhan *green jobs* diperkirakan sekitar 5.000. Untuk mengembangkan jumlah pekerjaan layak dan berkelanjutan di sektor energi dan penambangan, sangat penting adanya komitmen untuk mengembangkan sub sektor geotermal, biomassa, dan energi yang dapat diperbarui dengan pesat. Keputusan Presiden No. 5/2006 menetapkan target kontribusi energi baru dan yang dapat diperbarui ke dalam perpaduan energi utama nasional - sebuah peningkatan dari 4,3 persen di tahun 2008 menjadi 17 persen di tahun 2025. Target ini dapat dipercepat untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan berkelanjutan pekerjaan hijau.

Di sektor manufaktur, studi ini mengidentifikasi tiga belas sub-sektor hijau, yaitu: minyak goreng yang ramah lingkungan, proses agro hijau, manufaktur ramping dari manufaktur pakaian, rotan, dan bambu, manufaktur materi yang mempromosikan pelestarian, produksi kimia dan pupuk organik, sabun organik, minyak esensial ramah lingkungan, semen hijau, manufaktur becak dan sepeda, manufaktur mesin uap, turbin, dan kincir angin, inisiatif efisiensi dan daur ulang energi. Jumlah keseluruhan

Indonesia berharap memiliki 17 persen sumber energi dari sumber daya yang dapat diperbarui pada tahun 2025, yang akan meningkatkan jumlah pekerjaan di sektor energi

pekerjaan ramah lingkungan di sektor manufaktur diperkirakan sekitar satu juta pekerjaan (8,5 persen dari pekerjaan di sektor manufaktur) dan diperkirakan sekitar 331.000 (2,6 persen dari pekerjaan dalam sektor ini) dipertimbangkan sebagai *green jobs*. Untuk memperluas jumlah pekerjaan layak dan berkelanjutan di sektor manufaktur, sangat penting untuk mengembangkan dan mengimplementasikan inisiatif yang terfokus pada peningkatan kelestarian dari sektor ini, termasuk juga inisiatif untuk mendukung peningkatan kualitas pekerjaan. Terdapat potensi untuk meningkatkan jumlah pekerjaan hijau dalam sub sektor minyak goreng ramah lingkungan dan proses argo hijau melalui penyediaan insentif/disinsentif bagi perusahaan untuk mendukung pengelolaan limbah dan aplikasi praktik hemat energi yang mengurangi dampak lingkungan. Sektor tenun, tekstil, garmen, dan pakaian memiliki kemampuan untuk meningkatkan efisiensi lingkungan dan sosial dari proses pabrik melalui penggunaan pendekatan manufaktur ramping.

*Penguatan
pengawasan
ketenagakerjaan
dalam sektor
konstruksi sangat
penting untuk
peningkatan kondisi
kerja*

Di sektor pembangunan, studi ini mengidentifikasi empat sub sektor hijau, yaitu: bangunan hijau, infrastruktur transportasi intensif pekerja, irigasi dan manajemen air, dan pemasangan sumber daya yang dapat diperbarui. Jumlah keseluruhan *green jobs* di sektor pembangunan diperkirakan sekitar 415.000 (7,6 persen dari seluruh pekerjaan di dalam sektor ini) dan jumlah keseluruhan *green jobs* diperkirakan sekitar 187.000 (3,4 persen dari pekerjaan di dalam sektor ini). Untuk meningkatkan jumlah pekerjaan hijau dalam sektor pembangunan “bangunan hijau” sangat penting bagi kontraktor untuk berpartisipasi dalam proses sertifikasi bangunan hijau dan mengadopsi standar pengadaan hijau dalam proyek mereka, termasuk menggunakan “produk hijau” yang disertifikasi dan mengadopsi praktik pengelolaan limbah ramah lingkungan. Hal lain yang dapat dipertimbangkan adalah memperkuat kondisi pekerjaan di sektor konstruksi melalui kerja sama dengan pemerintah dan organisasi pengusaha dan pekerja dalam proses aplikasi upah minimum, pengawasan situs pembangunan, serta dalam perjanjian dan rancangan proyek untuk memastikan bahwa pekerjaan dalam sub sektor konstruksi transportasi memperhatikan intensif pekerja dan kelayakan bangunan hijau.

Di sektor transportasi, studi ini mengidentifikasi tiga sub sektor hijau, yaitu: transportasi publik massal, transportasi bukan kendaraan bermotor dan kereta api, dan transportasi sungai dan laut. Jumlah keseluruhan pekerjaan ramah lingkungan di sektor transportasi diperkirakan sekitar 1,6 juta (26,9 persen dari pekerjaan di sektor transportasi) dan diperkirakan sekitar 603.000 (9,8 persen dari pekerjaan dalam sektor ini) dipertimbangkan sebagai *green jobs*. Untuk meningkatkan jumlah *green jobs* di sektor transportasi sangat penting untuk mendukung peningkatan jaringan kereta api dan transportasi publik massal di darat, dan untuk terfokus pada peningkatan kualitas sistem transportasi yang ada. Hal lain yang dapat dipertimbangkan adalah meningkatkan kualitas pekerjaan dalam sub sektor “transportasi bukan kendaraan bermotor” yang saat ini masih informal dan belum terorganisir secara luas.

Di sektor pariwisata, studi ini mengidentifikasi empat sub sektor hijau, yaitu: pelayanan akomodasi yang ramah lingkungan, pelayanan pariwisata yang ramah lingkungan, manajemen ramah lingkungan dari tujuan wisata, dan spa hijau. Jumlah keseluruhan pekerjaan ramah lingkungan dalam sektor pariwisata diperkirakan sekitar 21.000 pekerjaan dan jumlah keseluruhan *green jobs* diperkirakan sekitar 11.000 pekerjaan. Untuk mendukung peningkatan *green jobs* di industri pariwisata sangat penting untuk mendukung pengimplementasian Rencana Strategi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Pariwisata yang berkelanjutan dan *green jobs* yang berupaya untuk menerapkan pendekatan ramah lingkungan dalam perencanaan pariwisata dan mempromosikan standar ketenagakerjaan dalam pariwisata.

Untuk mendukung peningkatan green jobs dalam industri pariwisata sangat penting untuk menerapkan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Pariwisata yang berkelanjutan dan Green jobs

Kotak 5:

Akses mata pencaharian hijau dan REDD+

Diakui adanya kebutuhan besar untuk mengurangi emisi dari penggundulan hutan dan degradasi hutan (REDD+), Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan untuk membekukan bukaan hutan alami antara tahun 2011 dan 2013 dan peraturan (2/2007) menetapkan rehabilitasi dan konservasi wilayah Proyek Lahan Gambut (EMRP) di Kalimantan Tengah. Sesuai dengan Rencana Utama EMRP, ILO memulai sebuah proyek percontohan selama 12 bulan yang dikenal sebagai “Akses ke Mata Pencaharian Hijau untuk Respons Lingkungan yang Inklusif di Kalimantan Tengah terhadap Perubahan Iklim”, untuk meningkatkan akses mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat lokal di Kalimantan Tengah melalui pengenalan pendekatan partisipatif sumber daya lokal dan pembangunan kapasitas lokal untuk merehabilitasi hutan tertinggal, mempromosikan mata pencaharian berkelanjutan, dan meningkatkan akses ke fasilitas sosial-ekonomi dan pasar.

Sesuai dengan Konvensi ILO mengenai Hak-hak Masyarakat Adat (Konvensi 169), proyek ini telah berhasil menyelesaikan sejumlah konsultasi dan kegiatan perencanaan partisipatif dengan para pemangku kepentingan terkait yang dapat membantu proyek ini mengidentifikasi kegiatan yang dapat meningkatkan akses atas mata pencaharian berkelanjutan. Pada September 2013, proyek ini akan merehabilitasi lahan tertinggal seluas 100 ha di wilayah sasaran proyek, meningkatkan akses atas mata pencaharian berkelanjutan melalui investasi infrastruktur di lima desa, dan melatih sekitar 300 sukarelawan dalam pelatihan keterampilan dan kewirausahaan yang berdasarkan pada permintaan untuk pembangunan rantai nilai hijau.

2.7 Pariwisata yang berkelanjutan⁷

Pariwisata dan ekonomi kreatif memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Pariwisata dan ekonomi kreatif bersama-sama berkontribusi sekitar 11,8 persen ke dalam PDB dan memberikan kira-kira 14,7 persen angkatan kerja yang memiliki pekerjaan. Banyak pariwisata Indonesia berkaitan dengan lingkungan alami dan disadari bahwa kesejahteraan dan kualitas hidup pekerja dalam sektor pariwisata sangat penting bagi kelangsungan ekonomi, sosial dan lingkungan dari industri ini.

Pada tahun 2012 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan Rencana Strategis untuk Pariwisata yang berkelanjutan dan Pekerjaan Hijau yang menyediakan kerangka kerja terpadu untuk promosi industri pariwisata yang berkelanjutan yang kaya dengan pekerjaan.

Pada tahun 2012 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan Rencana Strategis untuk Pariwisata yang berkelanjutan dan Pekerjaan Hijau yang menyediakan kerangka kerja terpadu untuk mempromosikan industri pariwisata berkelanjutan yang kaya dengan pekerjaan. Rencana strategis menekankan pentingnya koordinasi dan kerjasama antara semua pemangku kepentingan dalam perencanaan dan penerapan kebijakan dan program terkait dengan pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia. Efektivitas kebijakan ini harus didukung dengan struktur yang memungkinkan koordinasi antara semua pemangku kepentingan dan kombinasi pengadopsian yang seimbang dari setiap instrumen termasuk pendekatan berbasis pasar, kebijakan, dan sukarela.

Melengkapi kerangka kerja kebijakan nasional yang sudah ada, yang ditetapkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Indonesia (RPJP), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Jangka Panjang (RIPPARNAS), dan Rencana Strategis Jangka Menengah Kepariwisata (RENSTRA), Rencana Strategis Pariwisata yang berkelanjutan dan Pekerjaan Hijau 2012 mengusulkan dimensi kebijakan utama baru sebagai keterpaduan dengan strategi perencanaan kepariwisataan yang ramah lingkungan.

- Sesuai dengan pengarahannya yang pro rakyat miskin, agenda pembangunan pariwisata diharapkan dapat memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan;
- Pemahaman dan komitmen dari Pekerjaan Hijau untuk mendukung transisi yang layak bagi pekerja dan pengusaha melalui perlambatan karbon rendah dan perubahan iklim, pembangunan yang bertanggungjawab pada lingkungan dan sosial di Indonesia merupakan aspek penting pariwisata yang berkelanjutan dan harus dituangkan dalam kebijakan;
- Kaum muda menjadi segmen strategis dari pasar domestik demi alasan sosial budaya dan sosial politik, tetapi kaum muda juga menjadi potensi tenaga kerja yang dapat memenuhi permintaan akan pekerja dinamis sejalan dengan pertumbuhan permintaan dari pariwisata alternatif;

⁷ Bagian dari Laporan Tren Ketenagakerjaan dan Sosial ini dipersiapkan berdasarkan masukan dari Oliver Ortis.

- Pencapaian pekerjaan layak merupakan bagian penting dari pariwisata yang berkelanjutan dan agenda pro rakyat miskin dan pro pekerja;
- Tendensi gender dan pencegahan pekerja anak merupakan dua tujuan yang signifikan untuk terus ditekankan dalam agenda pengembangan pariwisata di Indonesia; dan
- Untuk mencapai jalur yang konsisten dari pembangunan, pedoman standar untuk pengoperasian dan kinerja pariwisata yang berkelanjutan harus dikembangkan dan diimplementasikan.

Kerangka kerja strategis untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan mengidentifikasi empat strategi utama yang memberikan dasar bagi aksi prioritas, termasuk meningkatkan kesadaran untuk mengubah pola pikir pemangku kepentingan, pembangunan dan penggunaan indikator pariwisata yang berkelanjutan dan manajemen strategis, serta pemantauan dan pelaksanaan tujuan pariwisata yang berkelanjutan.

Berikut sepuluh pengimplementasian strategis yang diajukan dalam melakukan tindak lanjut dimensi kebijakan baru:

- Penyaluran dan Promosi Pekerjaan Hijau melalui Pariwisata yang berkelanjutan;
- Pemberian Prioritas bagi Pengentasan Kemiskinan di Sektor Pariwisata;
- Peningkatan Kesempatan Tenaga Kerja Muda dalam Sektor Pariwisata dan Pariwisata Muda;
- Pemberian Dukungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Isu Memerangi Gender dan Perlindungan Anak;
- Pengimplementasian Sistem Kode/Standar Sukarelawan untuk Pariwisata yang berkelanjutan;
- Penetapan Edukasi, Pelatihan, dan Penelitian terkait Pariwisata sebagai Prioritas dalam Agenda Edukasi dan Penelitian Nasional;
- Pengidentifikasi Rekan Kerja Lokal Berkomitmen dan Berpotensi;
- Pelaksanaan Pemasaran Kreatif dan Selektif;
- Penerapan Pendekatan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pariwisata; dan
- Penetapan Badan Koordinatif Tunggal untuk Pembangunan Pariwisata yang berkelanjutan.

Rencana Strategis untuk Pariwisata yang berkelanjutan dan Pekerjaan Hijau secara resmi didukung oleh Pemerintah Indonesia. Rencana yang telah terpadu ke dalam kebijakan pariwisata nasional dan didistribusikan ke 33 provinsi sebagai panduan strategis dan implementasi regional.

Dengan penyaluran pekerjaan hijau dalam kebijakan pariwisata nasional, diharapkan tujuan pencapaian pekerjaan yang produktif dan layak dapat dilaksanakan, bersamaan dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan dari pembangunan ekonomi lokal.

2.8 Ketahanan sosial: Kesetaraan upah

Perbedaan kompensasi bulanan dan harian antara laki-laki dan perempuan merupakan masalah pelik dalam pasar tenaga kerja di seluruh dunia

Perbedaan kompensasi bulanan dan harian antara laki-laki dan perempuan merupakan masalah pelik dalam pasar tenaga kerja di seluruh dunia. Pertanyaannya tentu saja “mengapa terdapat kesenjangan upah di antara gender?” Penelitian yang dilakukan oleh proyek MAMPU ILO, “Akses terhadap Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak bagi Perempuan” telah menginvestigasi pertanyaan ini dengan menggunakan data Sakernas dari bulan Agustus 2010 dan juga data yang dikumpulkan dari survei dasar proyek ini. Penelitian ini pertama-tama melihat kompensasi yang diterima berdasarkan faktor yang termasuk di dalamnya edukasi, pengalaman, dan tanggung jawab keluarga, kemudian variasi upah yang dipertimbangkan sebagai kosekuensi dari pilihan pekerjaan dan industri berdasarkan gender. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi batas variasi dalam kesetaraan upah yang didorong oleh diskriminasi berdasarkan gender.

Analisis awal menggunakan data Sakernas dari bulan Agustus 2010 diperkirakan bahwa upah bulanan rata-rata (termasuk rekening pribadi, pengusaha, dan buruh paruh waktu) yang diperoleh oleh laki-laki adalah Rp. 952.341 dan upah rata-rata sebesar Rp. 695.550 untuk perempuan. Hal ini berarti bahwa perempuan mendapatkan penghasilan Rp. 256.791 lebih sedikit atau kira-kira 35 persen lebih sedikit dari laki-laki. Oleh karena itu, rata-rata, perempuan hanya memperoleh upah sebesar 73 persen dari upah bulanan laki-laki. Bagaimanapun juga, alasan di balik perbedaan ini tidak jelas. Misalnya, apakah perempuan mendapatkan upah yang lebih kecil dari laki-laki karena diskriminasi pengalaman atau mereka memiliki karakteristik tertentu yang merendahkan nilai mereka di mata pengusaha?

Faktor, seperti prestasi pendidikan, pengalaman bekerja, pilihan industri dan pekerjaan berkontribusi dalam perbedaan kesetaraan upah di antara gender

Poin analisis lebih lanjut terhadap tingkat yang rendah dari prestasi pendidikan menjadi tolok ukur perbedaan remunerasi antara lelaki dengan perempuan. Juga ditemukan bahwa pembayaran upah perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi dan pengalaman bekerja selama bertahun-tahun masih lebih kecil dibandingkan laki-laki. Kepala keluarga, baik laki-laki atau perempuan, diharapkan untuk memiliki penghasilan yang lebih banyak, namun tetap saja perempuan akan memperoleh upah yang lebih kecil dibandingkan laki-laki.

Perempuan tampaknya memilih bidang studi yang akan membawanya ke pekerjaan dengan upah di bawah rata-rata. Lebih lanjut, pemutusan partisipasi pasar tenaga kerja berdampak pada pengalaman kerja mereka dan juga pendapatan yang diperoleh oleh perempuan yang bekerja. Perempuan mendapatkan upah yang lebih kecil dari laki-laki di setiap industri dan pekerjaan. Pekerjaan pabrik biasanya memiliki upah yang lebih kecil dibandingkan dengan pekerjaan lain, namun bagi perempuan, terdapat upah premium untuk setiap perempuan yang bekerja di pabrik.

Sudah biasa bagi laki-laki untuk bekerja lembur, upah lembur dan terkait dengan pekerjaan yang menerima upah berdasarkan kinerja, di mana kebanyakan perempuan lebih suka bekerja paruh waktu, untuk waktu yang lebih sedikit (mencurahkan lebih banyak waktu pada pekerjaan rumah tangga yang umumnya dilakukan oleh perempuan di Indonesia). Perempuan juga biasa ditemukan dalam pekerjaan yang tidak berkaitan dengan bonus kinerja - misalnya pekerjaan sekretarial, administrasi, keuangan, keperawatan, dan pendidikan. Perbedaan jam kerja dan tugas kerja juga membantu menjelaskan mengapa tingkat remunerasi antara laki-laki dengan perempuan sangat beragam.

Secara keseluruhan diperkirakan bahwa kira-kira 59 persen dari kesenjangan upah berdasarkan gender tidak dapat dijelaskan dan dapat dikategorikan ke dalam diskriminasi gender. Namun, diketahui pula bahwa status pekerjaan dan formalitas memainkan peran penting dalam diskriminasi gender. Analisis disagregat yang meneliti kesenjangan upah berdasarkan gender untuk para pekerja ditemukan bahwa hanya 31 persen dari kesenjangan upah berdasarkan gender yang tidak dapat dijelaskan dan dapat dikategorikan ke dalam diskriminasi. Oleh karena itu, terdapat perbedaan besar dalam pemaparan diskriminasi gender antara pasar tenaga kerja formal dengan informal.

Analisis dari data awal MAMPU 2012 telah mengidentifikasi beberapa efek perbedaan gender secara khusus di pabrik. Secara umum diketahui bahwa pekerjaan pabrik memberikan upah di bawah rata-rata dari semua contoh yang dijadikan bahan survei dalam studi dasar ini. Namun, untuk perempuan, upah pabrik merupakan hal yang positif dan besar. Hal ini terjadi karena kebanyakan pabrik menawarkan pekerjaan dalam perekonomian formal. Namun, tekanan antara formalitas dengan remunerasi ditemukan dalam satuan data, yaitu upah premium diberikan pada pekerjaan yang dilakukan di lokasi khusus di rumah, pekerjaan di ladang, pekerjaan di rumah majikan, dan pekerjaan di lokasi yang tidak spesifik. Hal ini menyarankan bahwa masalah kesetaraan upah sangat rumit, memerlukan pemahaman kompleks mengenai pengertian pekerjaan layak – jauh di luar paradigma formalitas dan analisis disagregat gender.

Salah satu temuan yang mengejutkan dalam studi dasar adalah perempuan yang membawahi lima atau lebih bawahan menerima upah lebih sedikit daripada yang tidak. Lebih lanjut, pengawas perempuan menerima upah lebih sedikit dibandingkan rekan kerja laki-laki mereka. Situasi ini menekankan pada masalah upah yang adil untuk pekerjaan yang adil dan menanyakan mengenai efektivitas dari aplikasi prinsip ini dalam kompleksitas lingkungan kerja yang ada di Indonesia.

Terdapat perbedaan besar dalam pemaparan diskriminasi gender antara perekonomian formal dengan informal

Kesetaraan upah sangat rumit, memerlukan pemahaman kompleks mengenai pekerjaan layak

Organisasi pengusaha dan pekerja dapat mempromosikan pekerjaan yang adil untuk upah yang adil melalui audit yang sensitif gender dan meningkatkan kesadaran mengenai kesetaraan gender di dunia pekerjaan.

Perhatian besar diberikan berkaitan dengan dampak dialog sosial mengenai upah. Dialog sosial yang efektif dapat mempromosikan hak pekerja, termasuk kebebasan berserikat, perundingan secara bersama, dan akses atas perlindungan sosial. Namun hasil analisis terkait dengan keanggotaan serikat dan kondisi kerja secara statistik tidak signifikan, dan menyarankan penguatan kapasitas berunding dari organisasi pekerja untuk meningkatkan efektivitas mereka.

Untuk mempromosikan kesetaraan upah di Indonesia, Proyek MAMPU: Akses terhadap Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak bagi Perempuan mendukung Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengembangkan Panduan bagi pengusaha mengenai Pelaksanaan Evaluasi Pengupahan yang Tidak Memihak Gender. Proyek ini juga menekankan strategi untuk memperkuat pekerja rumahan perempuan, yang saat ini mengoperasikan ekonomi informal, untuk mengakses pekerjaan layak.

2.9 Upaya untuk menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan⁸

Negara-negara di seluruh dunia menerapkan intervensi pasar tenaga kerja untuk mempromosikan pembangunan yang berdampak sosial dan ekonomi. Pemerintah Indonesia sangat aktif terkait dengan hal ini, dan tidak seperti krisis sebelumnya, ada usaha yang patut dari pemerintah untuk mengurangi dampak penurunan ekonomi global 2008-2010. Tidak hanya Indonesia yang menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk merangsang ekonomi, mereka juga secara langsung turun tangan untuk melindungi dan menciptakan pekerjaan. Di masa mendatang, Indonesia akan memperkuat ketahanannya melalui usaha yang melindungi keterampilan, memfasilitasi kesetaraan antara pencari kerja dengan pengusaha, dan melindungi penghasilan penganggur dan kelompok yang rentan. Intervensi pasar tenaga kerja lambat laun dapat juga digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan lingkungan berdasarkan hubungan antara lingkungan dan kehidupan yang berkelanjutan. Kebijakan dan program seperti ini harus dikembangkan dalam saat ekonomi sedang baik dan dirancang sedemikian rupa agar memunyai pengaruh kontra siklus.

Perangkat seperti basis data “inventaris” dapat digunakan untuk menggambarkan pelajaran untuk pembuatan kebijakan yang lebih efektif.

Terdapat berbagai perangkat yang dapat digunakan untuk mendukung rancangan efektif dan koheren dari kebijakan yang bertujuan untuk penguatan ketahanan. Misalnya, perangkat data online yang dikenal sebagai “Inventaris ILO/Bank Dunia dari respons kebijakan terhadap krisis ekonomi dan finansial global tahun 2008” memberikan catatan rinci dari kebijakan yang berlaku selama puncak krisis finansial (2008-2010). Perangkat ini termasuk rincian dalam penerapan rancangan kebijakan untuk menjawab penurunan

⁸ Bagian Laporan Tren Ketenagakerjaan dan Sosial didukung oleh masukan Inventaris ILO/Bank Dunia dalam respons kebijakan terhadap krisis ekonomi dan finansial global tahun 2008.

perekonomian di masa mendatang. Pembuat kebijakan dan peneliti dapat menggunakan perangkat ini untuk mengembangkan kebijakan berbasis bukti dan menggambarkan lebih lanjut pelajaran selanjutnya menjadi lebih relevan dalam ekonomi global yang tidak pasti.

Lebih penting, pelajaran dari krisis ini menekankan peran dialog sosial dalam pembangunan respons kebijakan yang efektif. Dialog sosial menjadi semakin penting selama krisis, karena dialog ini dapat membantu mempercepat pemulihan dan membantu pergerakan ekonomi menuju keseimbangan baru yang lebih cepat melalui berbagi informasi. Dialog sosial juga membangun kepercayaan dan konsensus untuk mengimplementasikan kebijakan yang diperlukan untuk pemulihan ekonomi.

Secara keseluruhan, direkomendasikan bahwa untuk bekerja dengan model yang dibingkai oleh prinsip “Petumbuhan berkelanjutan dengan ekuitas”, sebuah negara harus fokus pada:

- Peningkatan koordinasi antara kebijakan makro dan sektoral;
- Perluasan ruang lingkup asuransi sosial untuk semua pekerja;
- Pengintegrasian dan penguatan jaringan jaminan;
- Pertimbangan ulang rancangan program pasar tenaga kerja aktif termasuk yang sudah dipakai untuk menstimulasi permintaan pekerja;
- Investasi dalam sistem informasi pasar tenaga kerja; dan
- Promosi dialog sosial dan peningkatan kewaspadaan untuk menghindari pelanggaran hak di tempat kerja.

Indonesia telah memprioritaskan investasi dalam modal sumber daya manusia dan konektivitas, dengan fokus pada strategi pembangunan sektoral. Indonesia juga memposisikan diri sebagai pemimpin global dalam perubahan ke perekonomian yang lebih hijau. Kerangka kerja ini menggerakkan negara ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal kesejahteraan, pembangunan berkelanjutan dan sumber daya manusia. Indonesia telah menetapkan berbagai target pembangunan jangka menengah, walaupun masih terdapat banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan kelangsungan mata pencaharian. Peningkatan akses terhadap perlindungan sosial, pengelolaan dialog sosial yang efektif, dan mempertahankan hasil pembangunan merupakan tantangan yang masih berlangsung. Berdasarkan latar belakang ini, Indonesia dapat lebih ambisius dalam menetapkan target untuk meningkatkan kualitas mata pencaharian dan pekerjaan, khususnya bagi mereka yang dapat keluar dari krisis yang paling rendah, dalam rencana pembangunan jangka menengahnya.

Indonesia memiliki catatan yang impresif dari pertumbuhan ekonomi di masa lalu dan tantangannya sekarang adalah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini ditejemahkan dalam peningkatan mata pencaharian yang berkelanjutan

Lampiran I: Pemilahan pekerjaan di sektor perekonomian formal dan informal, BPS

Status Pekerjaan	Pekerjaan Utama									
	Pekerja profesional, teknik, dan yang terkait	Pekerja administratif dan manajerial	Pekerja ketatausahaan dan yang terkait	Pekerja penjualan	Pekerja pelayanan	Pekerja pertanian, peternakan, kehutanan, dan dalam industri perikanan, serta perburuan	Pekerja produksi dan yang terkait	Pekerja transportasi dan operator perangkat	Buruh	Lain-lain
Pekerja mandiri, bekerja sendiri	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja mandiri, dibantu oleh pekerja sementara/sukarelawan	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Pengusaha	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pegawai	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja paruh waktu di sektor pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja paruh waktu bukan di sektor pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Sukarelawan	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Sumber: BPS (2012) *Sitansi Angkatan Kerja di Indonesia: Agustus 2012*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Note: F kependekan dari formal dan INF kependekan dari informal.

Lampiran II:
Lampiran statistik – Indikator pasar tenaga kerja berdasarkan gender 2006-2012

Variabel	Agustus 2006	Agustus 2007	Agustus 2008	Agustus 2009	Agustus 2010	Agustus 2011	Agustus 2012
Penduduk	NA	NA	229.033.995	231.832.834	238.219.392	241.564.863	244.750.214
• Laki-laki	NA	NA	114.586.031	116.050.632	119.852.909	121.625.982	123.246.172
• Perempuan	NA	NA	114.447.964	115.782.202	118.366.483	119.938.881	121.504.042
Penduduk berusia 15 tahun dan lebih	160.811.498	164.118.323	166.641.050	169.328.208	172.070.339	171.756.077	173.926.703
• Laki-laki	80.441.969	82.079.391	82.841.198	84.174.122	85.820.939	85.710.829	86.806.933
• Perempuan	80.269.529	82.038.932	83.799.852	85.154.086	86.249.400	86.045.248	87.119.770
Aktif secara ekonomi	106.388.935	109.941.359	111.947.265	113.833.280	116.527.546	117.370.485	118.053.110
• Laki-laki	67.749.891	68.719.887	69.144.337	70.409.087	71.881.763	72.251.521	73.284.748
• Perempuan	38.639.044	41.221.472	42.802.928	43.424.193	44.645.783	45.118.964	44.768.362
Tidak di dalam angkatan kerja	54.422.563	54.176.964	54.693.785	55.494.928	55.542.793	54.385.592	55.873.593
• Laki-laki	12.692.078	13.359.504	13.090.168	13.765.035	13.939.176	13.459.308	13.522.185
• Perempuan	41.730.485	40.817.460	41.603.617	41.729.893,0	41.603.617,0	40.926.284	42.351.408
Tingkat partisipasi angkatan kerja	66,2%	67,0%	67,2%	67,2%	67,7%	68,3%	67,9%
• Laki-laki	84,2%	83,7%	83,5%	83,6%	83,8%	84,3%	84,4%
• Perempuan	48,1%	50,2%	51,1%	51,0%	51,8%	52,4%	51,4%
Memiliki pekerjaan	95.456.935	99.930.217	102.552.750	104.870.663	108.207.767	109.670.399	110.808.154
• Laki-laki	61.977.289	63.147.938	63.899.278	65.122.526	67.462.223	67.989.943	69.068.965
• Perempuan	33.479.646	36.782.279	38.653.472	39.748.137	40.745.544	41.680.456	41.739.189
Rasio pekerjaan terhadap penduduk	59,4%	60,9%	61,5%	61,9%	62,9%	63,9%	63,7%
• Laki-laki	77,0%	76,9%	77,1%	77,4%	78,6%	79,3%	79,6%
• Perempuan	41,7%	44,8%	46,1%	46,7%	47,2%	48,4%	47,9%

Variabel	Agustus 2006	Agustus 2007	Agustus 2008	Agustus 2009	Agustus 2010	Agustus 2011	Agustus 2012
Pengangguran	10932000	10011142	9394515	8962617	8319779	7700086	7244956
• Laki-laki	5.772.602,0	5.571.949,0	5.245.059,0	5.286.561	4.419.540	4.261.578	4.215.783
• Perempuan	5.159.398,0	4.439.193,0	4.149.456,0	3.676.056	3.900.239	3.438.508	3.029.173
Tingkat pengangguran	10,3%	9,1%	8,4%	7,9%	7,1%	6,6%	6,1%
• Laki-laki	8,5%	8,1%	7,6%	7,5%	6,1%	5,9%	5,8%
• Perempuan	13,4%	10,8%	9,7%	8,5%	8,7%	7,6%	6,8%
Pekerjaan paruh waktu	15325882	15471987	16172862	16174364	18010583	21064033	21519289
• Laki-laki	6911014	6724577	7017014	6948257	7974803	9645554	10063378
• Perempuan	8414868	8747410	9155848	9226107	10035780	11418479	11455911
Tingkat pekerjaan paruh waktu	16,1%	15,5%	15,8%	15,4%	16,6%	19,2%	19,4%
• Laki-laki	11,2%	10,6%	11,0%	10,7%	11,8%	14,2%	14,6%
• Perempuan	25,1%	23,8%	23,7%	23,2%	24,6%	27,4%	27,4%
Pengangguran terselubung	13774867	14898192	14916506	15395570	15258755	13524054	12770339
• Laki-laki	8278796	8444974	8576340	8724692	8647031	7661408	7372591
• Perempuan	5496071	6453218	6340166	6670878	6611724	5862646	5397748
Tingkat pengangguran terselubung	14,4%	14,9%	14,5%	14,7%	14,1%	12,3%	11,5%
• Laki-laki	13,4%	13,4%	13,4%	13,4%	12,8%	11,3%	10,7%
• Perempuan	16,4%	17,5%	16,4%	16,8%	16,2%	14,1%	12,9%
Tingkat pekerjaan informal	62,8%	62,1%	61,3%	61,6%	59,0%	54,7%	53,6%
• Laki-laki	61,4%	59,9%	59,3%	60,1%	57,2%	0,0%	53,6%
• Perempuan	65,4%	65,9%	64,5%	64,0%	61,8%	0,0%	57,5%
Tingkat pekerjaan formal	37,2%	37,9%	38,7%	38,4%	41,0%	45,4%	46,4%
• Laki-laki	38,6%	40,1%	40,7%	39,9%	42,8%	0,0%	48,8%
• Perempuan	34,6%	34,1%	35,5%	36,0%	38,2%	0,0%	42,5%

Variabel	Agustus 2006	Agustus 2007	Agustus 2008	Agustus 2009	Agustus 2010	Agustus 2011	Agustus 2012
Tingkat pekerjaan rentan	68,8%	69,0%	69,5%	69,3%	66,9%	62,2%	60,1%
• Laki-laki	67,1%	66,4%	67,2%	67,4%	64,8%	59,7%	57,2%
• Perempuan	72,5%	74,0%	73,7%	72,5%	70,4%	66,2%	65,0%
Tingkat pekerja (pekerja bergaji)	28,1%	38,1%	27,5%	27,8%	29,6%	34,4%	36,4%
• Laki-laki	28,9%	29,9%	28,9%	28,6%	31,2%	35,9%	38,2%
• Perempuan	26,5%	24,8%	25,1%	26,4%	28,2%	32,1%	33,4%

Sumber: BPS (2012) *Sitnasi Angkatan Kerja di Indonesia: Agustus 2012*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Lampiran III:
Lampiran statistik – Indikator pasar tenaga kerja untuk kaum muda 2006-2012

Variabel	Agustus 2006	Agustus 2007	Agustus 2008	Agustus 2009	Agustus 2010	Agustus 2011	Agustus 2012
Penduduk usia kerja (15-24)	42.152.876	43.061.390	42.439.529	43.160.687	41.059.233	41.457.814	42.009.547
• Laki-laki	21.500.254	21.960.724	52.511.842	21.873.697	20.667.551	20.849.722	21.127.366
• Perempuan	20.652.622	21.100.666	20.927.687	21.286.990	20.391.682	20.608.092	20.882.181
Tidak dalam angkatan kerja (15-24)	19.872.306	20.548.852	20.855.631	21.436.435	20.902.784	20.564.495	21.268.284
• Laki-laki	8.233.472	8.164.244	8.591.818	8.739.589	8.646.764	8.411.405	8.644.616
• Perempuan	11.638.834	12.384.608	12.263.813	12.696.846	12.256.020	12.153.090	12.623.668
Angkatan kerja (15-24)	22.280.570	22.512.538	21.583.898	21.724.252	20.156.449	20.893.319	20.741.263
• Laki-laki	13.266.782	13.796.480	12.920.024	13.134.108	12.020.787	12.438.317	12.482.750
• Perempuan	9.013.788	8.716.058	8.663.874	8.590.144	8.135.662	8.455.002	8.258.513
Tingkat partisipasi angkatan kerja (15-24)	52,9%	52,3%	50,9%	50,3%	49,1%	50,4%	49,4%
• Laki-laki	61,7%	62,8%	24,6%	60,0%	58,2%	59,7%	59,1%
• Perempuan	43,6%	41,3%	41,4%	40,4%	39,9%	41,0%	39,5%
Bekerja (15-24)	15.464.354	16.852.502	16.552.881	16.902.483	15.833.385	16.717.575	16.683.372
• Laki-laki	9.578.277	10.518.143	10.100.765	10.291.497	9.490.000	10.041.100	10.057.950
• Perempuan	5.886.077	6.334.359	6.452.116	6.610.986	6.343.385	6.676.475	6.625.422
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk (15-24)36,7%		39,1%	39,0%	39,2%	38,6%	40,3%	39,7%
• Laki-laki	44,5%	47,9%	19,2%	47,0%	45,9%	48,2%	47,6%
• Perempuan	28,5%	30,0%	30,8%	31,1%	31,1%	32,4%	31,7%
Pengangguran (15-24)	6.816.216	5.660.036	5.031.017	4.821.769	4.323.064	4.175.744	4.057.891
• Laki-laki	3.688.505	3.278.337	2.819.259	2.842.611	2.530.787	2.397.217	2.424.800
• Perempuan	3.127.711	2.381.699	2.211.758	1.979.158	1.792.277	1.778.527	1.633.091
Tingkat pengangguran (15-24)	30,6%	25,1%	23,3%	22,2%	21,4%	20,0%	19,6%
• Laki-laki	27,8%	23,8%	21,8%	21,6%	21,1%	19,3%	19,4%
• Perempuan	34,7%	27,3%	25,5%	23,0%	22,0%	21,0%	19,8%

Sumber: BPS (2012) *Situasi Angkatan Kerja di Indonesia: Agustus 2012*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Lampiran IV:
Lampiran statistik – Indikator upah 2006-2012

Variabel	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Upah minimum rata-rata sederhana (nominal)	362,700	414,700	458,500	507,700	602,700	673,300	743,200	839,400	908,800	998,829	1,121,460
Upah rata-rata bersih perbulan untuk pekerja & buruh (nominal)	599,769	684,915	729,516	856,088	985,028	1,077,312	1,158,085	1,322,380	1,410,982	1,529,161	1,630,193
Pertumbuhan upah minimum rata-rata	NA	12,54%	9,55%	9,69%	15,76%	10,49%	9,41%	11,46%	7,64%	9,01%	10,93%
Pertumbuhan upah bersih rata-rata untuk pekerja dan buruh	NA	12,43%	6,11%	14,78%	13,09%	8,57%	6,97%	12,42%	6,28%	7,73%	6,20%
Indeks Harga Pelanggan	NA	5,16%	6,40%	17,11%	6,60%	6,59%	11,06%	2,78%	6,96%	3,79%	4,30%

Sumber: BPS (2012) *Situasi Angkatan Kerja di Indonesia: Agustus 2012*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

**Lampiran V:
Lampiran statistik – Indikator pasar tenaga kerja berdasarkan sektor perekonomian 2006–2012**

Sektor ekonomi	Agustus 2006	Agustus 2007	Agustus 2008	Agustus 2009	Agustus 2010	Agustus 2011	Agustus 2012
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	40.136.242	41.206.474	41.331.706	41.611.840	41.494.941	39.328.915	38.882.134
Pertambangan dan Penggalian	923.591	994.614	1.070.540	1.155.233	1.254.501	1.465.376	1.601.019
Manufaktur	11.890.170	12.368.729	12.549.376	12.839.800	13.824.251	14.542.081	15.367.242
Listrik, Gas, dan Air	228.018	174.884	201.114	223.054	234.070	239.636	248.927
Konstruksi	4.697.354	5.252.581	5.438.965	5.486.817	5.592.897	6.339.811	6.791.662
Perdagangan grosir, Perdagangan Ritel, Restoran, dan Hotel	19.215.660	20.554.650	21.221.744	21.947.823	22.492.176	23.396.537	3.155.798
Transportasi, Penyimpanan, dan Komunikasi	5.663.956	5.958.811	6.179.503	6.117.985	5.619.022	5.078.822	4.998.260
Pelayanan Finansial, Asuransi, Real Estate, dan Bisnis	1.346.044	1.399.490	1.459.985	1.486.596	1.739.486	2.633.362	2.662.216
Layanan Komunitas, Sosial, dan Pribadi	11.355.900	12.019.984	13.099.817	14.001.515	15.956.423	16.645.859	17.100.896
Total	95.456.935	99.930.217	102.552.750	104.870.663	108.207.767	109.670.399	110.808.154

Sumber: BPS (2012) *Situasi Angkatan Kerja di Indonesia: Agustus 2012*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.